

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA
BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL
MODERATING PADA PEMERINTAHAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2017 -2021**

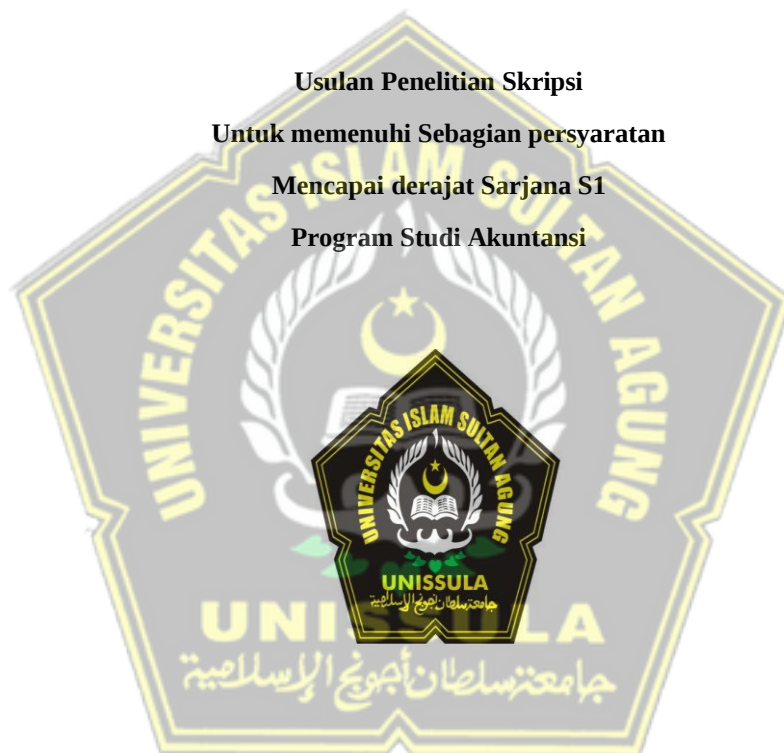
**Usulan Penelitian Skripsi
Untuk memenuhi Sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1
Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :
Desy Wulan Suci
NIM : 31401900202**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2023**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA
BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL
MODERATING PADA PEMERINTAHAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2017 -2020**



Usulan Penelitian Skripsi

Untuk memenuhi Sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi

Disusun Oleh :

Desy Wulan Suci

NIM : 31401900202

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2023**

Usulan Penelitian untuk Skripsi

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA
MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL
MODERATING**

(Studi Empiris Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 -2020)

Disusun Oleh :

Desy Wulan Suci

31401900202

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan
sidang panitia ujian usulan penelitian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 26 Desember 2022

Pembimbing,



Dr.Lisa Kartikasari, SE, M.Si., Ak., CA

NIP. 211402010

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERATING

(Studi Empiris Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 -2020)

Disusun Oleh :

Desy Wulan Suci

31401900202

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal, 01 februari 2023

Pembimbing

Susunan Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. Hj. Luluk M.Ifada, SE, M.Si, Akt, CA, CSRS

Ahmad Rudi Vulianto, S.E., M.Si., Ak.

Pembimbing

Dr. Lisa Kartikasari, SE, M.Si., Ak., CA

NIK. 211402010

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Provita Wijayanti, SE., M.Si

211403012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desy Wulan Suci

NIM : 31401900202

Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variable Moderating (Studi Empiris Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 -2020).

Menyatakan bahwa dengan sebenarnya skripsi yang saya serahkan ini benar adanya merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia untuk dikenakan sanksi akademis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Semarang, 21 Agustus 2022

Yang menyatakan



Desy Wulan Suci

LEMBAR PENGESAHAN TURNITIN

Nama : Desy wulan suci

NIM : 31401900202

Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA
MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERATING
PADA PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 -2021



Mengetahui Pembimbing Skripsi

Digitally signed
by Lisa
Kartikasari
Date: 2023.03.11
09:41:42 +07'00'

Dr. Lisa Kartikasari, SE, M.Si., Ak., CA

NIP. 211402010

Desy Wulan S

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.upstegal.ac.id Internet Source	3%
2	123dok.com Internet Source	2%
3	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
4	dspace.uji.ac.id Internet Source	2%
5	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
6	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
9	online-journal.unja.ac.id Internet Source	1%

Abstrak

Paper ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2017 -2020. Peneliti menghadirkan variabel baru yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi untuk memperkuat atau memperlemah interaksi PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Penerimaan APBD dan juga tabel PDRB yang berada di website resmi Badan Pusat Statistika. Teknik populasi dan sampelnya menggunakan Teknik *sampling* jenuh sebanyak 35 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yaitu terdiri dari 6 Kota dan 29 Kabupaten. Pengujian hipotesis menggunakan MRA yaitu Uji Moderated Regression Analysis pada SPSS. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa variabel Pendapatan asli daerah dan Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap Belanja modal sedangkan Dana alokasi umum dan Dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja modal. Namun pada penelitian ini menyebutkan bahwa variabel moderasi yaitu Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus dan Dana bagi hasil terhadap Belanja modal.

Kata Kunci : Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dana perimbangan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Alhamdulillah mari kita panjatkan untuk Allah SWT hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan. Syukur kita panjatkan atas segala rahmat, pertolongan, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 -2020).** ". Shalawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa telah menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk semua umat manusia.

Penelitian disusun ini untuk diajukan sebagai salah satu syarat bahwa telah menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung dengan harapan memberikan manfaat bagi para pengguna informasinya.

Penulis telah menyadari bahwa banyak pihak yang sudah memberikan dukungan dan bantuannya selama menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, sepantasnya sudah penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan, semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik kepada yaitu :

- 1) Prof. Olivia Facrunnisa, SE, M.Si., Ph. D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
- 2) Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE, M.Si., CSRS, Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.
- 3) Ibu Dosen Dr. Lisa Kartikasari, SE, M.Si., Ak., CA, selau dosen pembimbing, atas bimbingan dan ilmunya selama ini saya ucapkan terima kasih.
- 4) Dosen - dosen di Fakultas Ekonomi Unissula yang telah membimbing dan mengajar materi selama perkuliahan.
- 5) Orang tua saya Bapak Juweni dan Ibu Puji Astuti yang tak henti hentinya selalu memberikan semangat dan doa restunya.
- 6) Saudara saudara saya Ken nilam sari, Aji dewantara, dan Kinanthi mita yani selalu memberikan dukungannya.
- 7) Sahabat sahabat tersayang saya Aulia rahmadina, dan Intan diah permatasari, atas bantuan tempat dan waktunya yang diberikan untuk saya selama menyelesaikan laporan ini, terima kasih.
- 8) Wacana gengs selaku sahabat saya terutama Vika dahlia anugrahenni yang selalu membantu saya jika mengalami kesulitan selama laporan ini.
- 9) Orang Orang Sibuk selaku grup teman teman kampus saya , telah menemani dalam suka duka dan selalu menghibur dikala beratnya perkuliahan.
- 10) Terima kasih kepada Denis Yanuari yang selalu memberi semangat dan perhatiannya untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

11) Untuk semua teman kelompok bimbingan saya terima kasih telah bekerjasama dengan baik, selama bimbingan.

Tak lupa juga penulis ucapkan untuk seluruh pihak terkait yang membantu serta memotivasi peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis memohon maaf yang sebanyak banyaknya apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh penulis. Saran dan kritik yang membangun dapat disampaikan untuk menjadikan Laporan akhir ini menjadi lebih bermanfaat dan dapat lebih baik lagi bagi pembaca ataupun pihak yang membutuhkan.

Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all time.

Semarang , 21 Agustus 2022

Desy Wulan suci

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	9
2.1.2 Otonomi Daerah.....	11
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	12
2.1.4 Belanja Modal	12
2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	14
2.1.6 Dana Alokasi Umum (DAU).....	19
2.1.7 Dana Alokasi Khusus (DAK).....	20
2.1.8 Dana Bagi Hasil (DBH)	21
2.1.9 Pertumbuhan Ekonomi.....	22
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	23
2.3 Hubungan Logis Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis.....	25

2.3.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja modal	25
2.3.2	Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.....	27
2.3.3	Pengaruh Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal.....	28
2.3.4	Pengaruh Dana Bagi Hasil dengan Belanja Modal	29
2.3.5	Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap hubungan pendapatan asli daerah pada belanja modal.	30
2.3.6	Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap hubungan Dana alokasi umum (DAU) dengan belanja modal	31
2.3.7	Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap hubungan Dana alokasi khusus (DAK) dengan belanja modal	32
2.3.8	Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap hubungan Dana bagi hasil dengan belanja modal	33
2.4	Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....		35
3.1	Jenis Penelitian.....	35
3.2	Populasi dan Sampel	35
3.3	Sumber dan Jenis data	36
3.4	Metode pengumpulan data	37
3.5	Variabel dan Indikator.....	37
3.5.1	Variabel	37
3.5.2	Definisi Operasional dan Indikator	38
3.6	Metode Analisis.....	45
3.6.1	Statistik Deskriptif.....	45
3.6.2	Uji Asumsi Klasik	46
3.6.3	Pengujian Hipotesis	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		51
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	51
4.2	Analisis Statistik Deskriptif	52
4.3	Asumsi Klasik	56
4.3.1	Uji normalitas	56
4.3.2	Uji Multikolinieritas	58

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	60
4.4 Pengujian Hipotesis.....	61
4.4.1 Uji F.....	61
4.4.2 Uji T.....	62
4.4.3 Uji Moderating Regression Analysis (MRA).....	65
4.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	67
4.5 Pembahasan.....	68
4.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.....	68
4.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.....	70
4.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.....	71
4.5.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal	72
4.5.5 Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.	73
4.5.6 Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.	74
4.5.7 Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.	75
4.5.8 Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal.	76
BAB V PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Keterbatasan.....	79
5.3 Agenda Penelitian Yang Akan Datang.....	79
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	43
Tabel 4. 1 Jumlah Sampel	52
Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif :.....	53
Tabel 4. 3 One-Sampel Kolmogrov-Smirnov Test	58
Tabel 4. 4 Uji Multikolinieritas.....	59
Tabel 4. 5 Uji Autokorelasi.....	60
Tabel 4. 6 Uji Heteroskedastisitas.....	61
Tabel 4. 7 Uji F	61
Tabel 4. 8 Uji T	62
Tabel 4. 9 Ringkasan Hasil Uji T :.....	64
Tabel 4. 10 Uji MRA	65
Tabel 4. 11 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	68



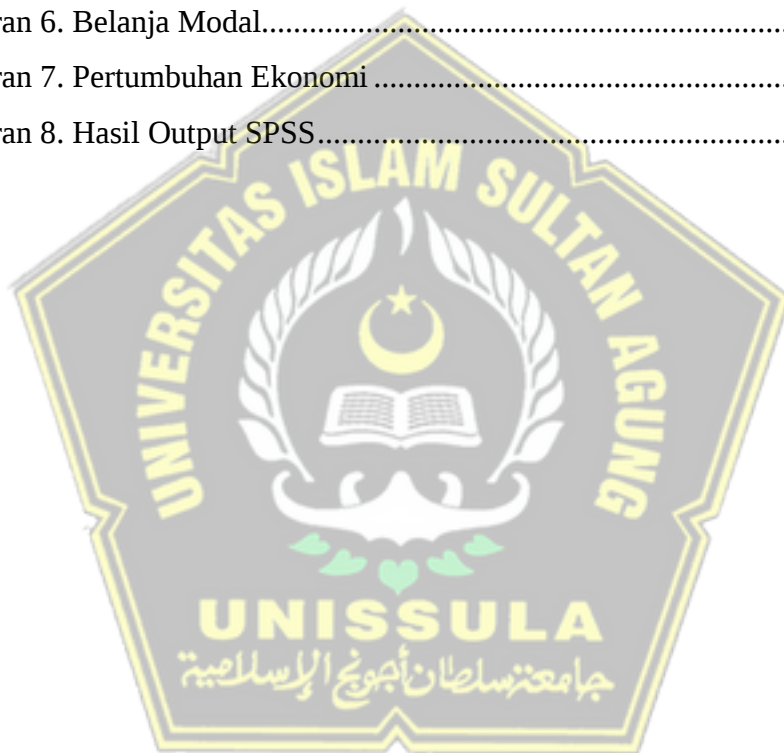
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	34
Gambar 4. 1 Histogram.....	57
Gambar 4. 2 Normal P-P Plot	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Populasi dan Sampel Penelitian	86
Lampiran 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	87
Lampiran 3. Dana Alokasi Umum (DAU)	88
Lampiran 4. Dana Alokasi Khusus (DAK)	89
Lampiran 5. Dana Bagi Hasil (DBH)	90
Lampiran 6. Belanja Modal	91
Lampiran 7. Pertumbuhan Ekonomi	92
Lampiran 8. Hasil Output SPSS	93



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan daerah terus dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 dijalankan pula otonomi daerah yaitu pemberian kewewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus, mengatur dan mengembangkan daerahnya dengan kemampuan daerahnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD merupakan pembiayaan pembangunan daerah. Terdapat beberapa sumber sumber APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Sumber sumber tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya dengan cara menaikkan kesejahteraan masyarakat serta menambah tingkat infrastruktur seperti pelaksanaan pembuatan gedung, bangunan, jalan, irigasi dan pembelian aset asset tetap lainnya. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilaksanakan guna membentuk modal seperti pengadaan, pembelian atau pembangunan aset tetap berwujud atau barang inventaris dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah Daerah dalam membuat alokasi belanja modal harus jelas disesuaikan menurut kebutuhan daerah dan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh. Melalui Pendapatan Asli Daerah ditentukannya tinggi atau kecilnya

suatu belanja modal. Kemudian apabila Pemerintah Daerah hendak menaikkan pelayanan untuk public serta kesejahteraan masyarakat dengan jalan cara meningkatkan belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah harus mampu berusaha keras agar dapat menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebanyak banyaknya .Adyatma & Oktaviani (2015).

Melalui website portal resmi Provinsi Jawa tengah, pada tahun 2017 pendapatan Provinsi Jawa tengah mengalami kenaikan empat triliun yaitu sebesar 23,703 triliun yang pada tahun 2016 hanya sebesar 19,632 triliun. Kenaikan tersebut dipengaruhi faktor antara lain kondisi perekonomian di Jawa Tengah selama 2017 yang membaik. Di tahun selanjutnya 2018 seperti yang dilansir website Tribun Jateng, kondisi ekonomi Jawa Tengah tumbuh sekitar 5,32% menguat dibandingkan tahun 2017 sebesar 5,26% . Kemudian tahun 2019 pendapatan asli daerah yang disampaikan Gubernur Jawa tengah, Ganjar Pranowo dalam Rapat Paripurna Tanggapan dan Jawaban Gubernur terhadap Badan Anggaran Jawa tengah juga meningkat melebihi target murni sebesar 289 Milyar.

Namun di tahun 2020, melalui website Detik finance Gubernur Jawa tengah mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan sejumlah 1,9 triliun atau sekitar 12,5% dengan penurunan terbesar yaitu pajak pada kendaraan bermotor terutama untuk BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Hal ini terjadi dikarenakan pandemi covid -19 yang melanda di tahun 2020.

Pada penelitian milik Sulistyaningsih & Haryanto (2019) menyebutkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Artinya bahwa jika Pendapatan asli daerah besar maka anggaran atau alokasi belanja modal juga ikut meningkat begitu pula juga penerimaan Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus semakin tinggi maka pengalokasian belanja modal juga akan tinggi. Hasil tersebut selurus oleh penelitian Prasetyo & Isyunawardhana (2021) yang memperoleh hasil yaitu PAD, DAU, dan DAK secara simultan maupun parsial berpengaruh secara signifikan positif terhadap belanja modal.

Namun terdapat perbedaan pada penelitian Huda & Sumiati (2019) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, tetapi Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan pada Belanja Modal. Kemudian hal tersebut juga sama dengan penelitian oleh Fitri Dwi Jayanti (2020) bahwa Variabel (X1) yaitu Pendapatan Asli Daerah dan variabel (X2) Dana alokasi umum berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan variabel (X3) yaitu Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana alokasi khusus mengalami kurang keseimbangan pada keefektifan tata kelola implementasi, dan dana alokasinya tidak dapat diserap baik oleh belanja modal sehingga masih banyak pengalokasiannya untuk belanja pegawai.

Selanjutnya peneliti memiliki motivasi untuk mereplikasikan dan mengembangkan penelitian sebelumnya dari Prasetyo & Isyunawardhana (2021) dengan melakukan pengujian kembali variabel belanja modal dan

menambahkan variable baru yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variable moderating. Kemudian dilakukan penelitian lanjutan dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 -2020)”**.

Melihat dari beberapa penelitian terdahulu yang ada, ditemukan hasil penelitian yang masih inkonsisten. Bahwa artinya belum tentu semua variable independen dapat mempengaruhi variable dependen. Dalam penelitian ini belum tentu Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus, Dana bagi hasil dapat mempengaruhi Belanja modal. Hal ini bisa terjadi karena kemungkinan dari sumber pembiayaan APBD seperti PAD, DAU, DAK, dan DBH belum bisa teralokasikan sesuai perencanaan, sehingga belanja modal tidak dapat terwujud. Seperti fenomena diatas pada tahun 2020, Jawa tengah mengalami pandemic covid-19 yang membuat daya beli konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan yang bersifat tersier menurun dan akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah Jawa tengah sebesar hamper 12,5% atau 1,9 triliun.

Dari penjelasan diatas maka dari itu peneliti butuh untuk menghadirkan variable lain yang diduga mampu menguatkan atau melemahan interaksi yaitu PAD, DAU, DAK, DBH dengan Belanja modal yaitu seperti variable moderating. Pada penelitian ini variable moderatingnya adalah Pertumbuhan

Ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi merupakan seperti kegiatan didalam perekonomian yang mengakibatkan produksi produk dan jasa meningkat dan membuat peningkatan terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang terus bertambah disetiap tahunnya juga merupakan salah satu tujuan pemerintah daerah.

Pada penelitian oleh Fahrunisah & Badjuri (2015) menunjukkan hasil penelitian yaitu Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi mampu memoderasi variable Pendapatan asli daerah, namun tidak dapat memoderasi variable Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus pada Belanja modal. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian oleh Styaningrum (2020) memberikan hasil bahwa variable moderasi Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi Pendapatan asli daerah dan juga Dana alokasi umum pada Belanja modal. Selanjutnya Pada penelitian oleh Devi Inanta Purwati (2019) menghasilkan variable pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi Dana alokasi khusus namun tidak bisa memoderasi Pendapatan asli daerah serta Dana alokasi umum.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat pada pembahasan diatas, masih ditemukan masalah atau perbedaan pada beberapa penelitian yaitu “ketidakpastian pengaruh Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus, Dana bagi hasil terhadap Belanja modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Menurut latar belakang diatas, sehingga dirumuskan pertanyaan pada penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Apakah pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal?
2. Apakah pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal?
3. Apakah pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal?
4. Apakah pengaruh dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal?
5. Apakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap hubungan pendapatan asli daerah (PAD) dengan belanja modal?
6. Apakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap hubungan dana alokasi umum (DAU) dengan belanja modal?
7. Apakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap hubungan dana alokasi khusus (DAK) dengan belanja modal?
8. Apakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap hubungan dana bagi hasil (DBH) dengan belanja modal?

1.4 Tujuan Penelitian

Melalui penelitian inilah diharapkan mampu memberikan hasil yang akan dicapai atau diperoleh dengan tujuan seperti :

1. Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Untuk menguji pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

3. Untuk menguji pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4. Untuk menguji pengaruh dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
5. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap hubungan pendapatan asli daerah (PAD) dengan belanja modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
6. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap hubungan dana alokasi umum (DAU) dengan belanja modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
7. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap hubungan dana alokasi khusus (DAK) dengan belanja modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
8. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap hubungan dana bagi hasil (DBH) dengan belanja modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menghasilkan manfaat antara lain :

- 1) Aspek Teoritis (Keilmuan)
 - a. Dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya dalam mengembangkan topik topik masalah yang terkait atau berguna sebagai referensi dalam penelitiannya

- b. Dapat digunakan oleh pengembang teori sebagai kontribusi terutama pada bidang sektor akuntansi publik
- 2) Aspek Praktis (Guna Laksana)
- a. Guna sebagai informasi kepada Pemerintah mengenai informasi bahwa pentingnya untuk memaksimalkan potensi daerah dalam mengoptimalkan kualitas dan memajukan daerahnya
 - b. Hasil penelitian berguna sebagai informasi untuk pihak pihak yang membutuhkan atau pihak terkait.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Smith (1984) teori keagenan merupakan suatu persetujuan (kontrak) diantara dua pihak, yakni pihak *principal* sebagai pihak pertama yang memberi wewenang kepada *agent* sebagai pihak kedua untuk mengambil keputusan atas nama *principal*. Dalam teori ini antara *Principal* dengan *agent* mempunyai tanggungjawab dan wewenang yang sudah disetujui bersama dan telah ditetapkan. Manfaat dari teori *agency* ini adalah dapat melakukan evaluasi pada hasil kerja (kontrak) antar *agent* dan *principal*. Selain manfaat tersebut manfaat lainnya adalah menambah kemampuan baik dari prinsipal maupun *agent* dalam melakukan evaluasi kondisi pada sebuah keputusan yang harus ditentukan. Namun disisi lain jika menurut teori ini, hubungan antara *Principle* dan *Agent* sangat susah atau sukar karena adanya kepentingan yang berlawanan.

Konflik kepentingan yang terjadi disebabkan karena *agent* tidak dapat selalu melakukan sesuai dengan *principal*, yang kemudian memicu adanya *agency cost* (Biaya Keagenan). Salah satu upaya agar terhindar dari adanya kepentingan yang berlawanan adalah dengan mengidentifikasi pada pihak yang memiliki kepentingan berbeda beda. Selain itu upaya lainnya adalah dengan membentuk peraturan dan menciptakan pengendalian yang efektif dan efesien, hal ini berguna agar tercapai suatu tujuan pada perusahaan atau organisasi.

Dalam penelitian ini keterkaitan hubungan principal dan agent terlihat saat penyaluran dana perimbangan terkait pemerintah pusat (principal) dengan pemerintah daerah (agent) serta hubungan antara masyarakat (principal) dengan Pemerintah daerah (agent). Sebagai principal, dalam penyaluran dana perimbangan pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah sebagai salah satu tanggung jawabnya untuk mengelola dan mengurus sendiri daerahnya dengan melalui cara mengalokasikan dana perimbangan secara efektif dan efisien sesuai dengan anggaran belanja modal yang telah dirancang dan disetujui.

Kemudian hubungan antara masyarakat (principal) dan pemerintah daerah (agent) adalah pemerintah daerah sebagai agent mempunyai pertanggungjawaban menyediakan pelayanan yang memadai (*public service*) kepada masyarakat seperti salah satunya memberikan sarana dan prasarana yang memadai dan terjamin di daerahnya, karena masyarakat sebagai principal juga telah melakukan tanggung jawabnya yaitu melakukan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan lain – lainnya. Semakin banyak masyarakat yang telah membayarkan kewajibannya, maka semakin tinggi pula pendapatan yang didapat di daerah tersebut. Hal ini penting dilakukannya pengalokasian dana atau pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan ekonomi dengan cara membuat anggaran belanja modal. Pengalokasian yang tidak efektif dan efisien membuat tujuan suatu daerah tidak akan terealisasi.

Negara yang demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau hubungan diantara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menyerahkan wewenang terhadap pemerintah daerah,

pemerintah daerah juga wajib mempertanggung jawabkan tugas terhadap pemerintah pusat. Disisi lain pemerintah daerah juga harus memaksimalkan kesejahteraan mereka , Zelmiyanti (2016).

2.1.2 Otonomi Daerah

Undang Undang Dasar 1945 mengatur tentang system otonomi daerah yang tertulis pada pasal 18 ayat (2) berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Artinya setiap wilayah diberikan hak atau wewenang untuk mengurus daerahnya sendiri. Sedangkan otonomi daerah menurut Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 (Pasal 1 ayat 6) adalah Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu otonomi daerah juga memiliki tujuan lain yaitu mengurangi beban pada pemerintah pusat dengan menyerahkan urusan daerah kepada pemerintah daerah agar pemerintah pusat dapat lebih fokus dan dapat menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik pada bidangnya. Menurut Fitri Dwi Jayanti (2020) , Otonomi ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang terbaik untuk masyarakat, dan masyarakat dapat berperan secara bersama-sama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama yang berorientasi untuk kepentingan daerah. Berdasarkan pengertian tersebut kemajuan atau perkembangan suatu daerah dapat ditentukan oleh bagaimana cara pemerintah

daerah menggunakan hak otonominya. Jika dalam implementasinya efisien dan efektif maka daerah tersebut akan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya jika hak otonominya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi kemungkinan suatu daerah mengalami penurunan infrastrukturnya.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, adalah rancangan keuangan pemerintah daerah tahunan yang ada di Indonesia, ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah dan telah disetujui oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD memiliki tahun anggaran yaitu meliputi masa satu tahun, yang dimulai dari tanggal 1 Januari hingga sampai tanggal 31 Desember.

APBD bagian dari Anggaran Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya), Pajak Daerah, Dana Perimbangan, antara lain, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan juga Pendapatan lain-lain yang sah yaitu Dana Darurat, Dana Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

2.1.4 Belanja Modal

Belanja Modal ialah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun serta dapat menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional serta biaya pemeliharaan.

Belanja modal mempunyai peran penting karena mempunyai masa manfaat jangka panjang untuk memberikan atau menyediakan pelayanan kepada public, Abid dan Rahayu dan Aminah (2018). Sedangkan menurut Halim (2002) seperti dikutip Huda & Sumiati (2019) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan belanja modal yaitu Belanja Pemerintah Daerah yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun anggaran serta dapat menambah aset ataupun kekayaan daerah dan kemudian dapat menambah belanja yang sifatnya rutin seperti biaya pemeliharaan terhadap kelompok belanja administrasi umum.

Anggaran Belanja modal juga ditentukan oleh seberapa penerimaan pendapatan asli daerah. Semakin meningkat penerimaan pendapatan asli daerah maka anggaran untuk belanja modal juga akan semakin tinggi, hal ini terjadi karena anggaran belanja modal tersebut nantinya akan dipergunakan untuk memperoleh asset daerah guna untuk memajukan infrastruktur daerah tersebut. Menurut Azhar & Hermanto (2021) Pada dasarnya alokasi belanja modal yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk membeli aset tetap yang merupakan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk memenuhi fasilitas publik. Menurut Pemendagri No 13 Tahun 2006 pada Pasal 36 , Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari :

- 1) Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
- 2) Belanja langsung yaitu merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Melalui Ismatullah (2019, hal 396) seperti dikutip Prasetyo & Isyunawardhana (2021), menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari sumber daerah yang sah seperti pajak, retribusi, keuntungan dari usaha milik daerah, pengelolaan kekayaan dari daerah yang berbeda, dan sumber lainnya.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menjadi sumber utama pendapatan, pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan infrastruktur dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Pendapatan asli daerah juga merupakan hasil iuran oleh masyarakat setempat seperti retribusi, pajak, dan lain sebagainya. Melalui PAD tersebut Pemerintah daerah memikul tanggung jawab kepada masyarakat dengan berupa memberikan pelayanan secara public dalam bentuk pemberian fasilitas sarana dan prasarana secara lengkap dan terealisasi.

Adapun beberapa sumber sumber dari pendapatan asli daerah Pasal 31 PP Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut, terdiri atas:

- 1) Pajak daerah;
- 2) Retribusi daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.5.1 Pajak Daerah

Pajak daerah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 (Pasal 1 ayat 10) yaitu Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menjadi sumber pendapatan daerah yang berpengaruh jika seluruh masyarakat membayarkan pajaknya. Semakin tinggi pajak yang dibayarkan otomatis akan menambah pendapatan daerah tersebut. Sehingga menaikkan pendapatan daerah dapat memenuhi kebutuhan daerah untuk masyarakat.

Adanya wewenang daerah untuk memungut pajak daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah agar dapat dipungut secara efektif dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak . Rahmawati & Tjahjono (2018)

Menurut aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Lampiran (III a) dan Lampiran (Iv a)

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, jenis pendapatan pajak untuk provinsi berupa pendapatan antara lain :

- (1) Pajak kendaraan bermotor
- (2) Pajak kendaraan di air
- (3) Bea balik nama kendaraan bermotor
- (4) Bea balik nama kendaraan di air
- (5) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- (6) Pajak air permukaan
- (7) Pajak rokok Selanjutnya jenis pajak kabupaten/kota tersusun dari pajak berikut : Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan c, Pajak lingkungan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

2.1.5.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah yang pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan/ tersedia sebagai imbalan atas pemanfaatan yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan Stevanus J. Gomies & Victor Pattiasina (2011). Undang – Undang yang mengatur tentang Retribusi Daerah tercantum pada UU No 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa retribusi daerah ialah pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian

ijin tertentu yang telah disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sedangkan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu:

(1) Retribusi jasa umum

adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

(2) Retribusi jasa usaha Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi jasa usaha untuk pemerintah provinsi meliputi berikut ini

(3) Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

2.1.5.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang merupakan bagian dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini terperinci sesuai objek pendapatan yang memuat:

- (1) Bagian laba dari penyertaan modal pada BUMD atau perusahaan milik daerah.
- (2) Bagian laba dari penyertaan modal pada BUMN atau perusahaan milik negara.
- (3) Bagian laba dari penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

2.1.5.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Ini merupakan pendapatan bagi suatu daerah yang berasal dari faktor lain dan telah menjadi milik pemerintah daerah. Selain yang disebutkan di atas, transaksi ini tersedia untuk mengakuntansikan.

- (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- (2) Jasa giro
- (3) Imbalan bunga
- (4) Laba selisish dari nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing.
- (5) Komisi, potongan, atau bentuk organisasi lainnya yang terkait dengan kerugian yang diakibatkan oleh pembelian dan/atau distribusi barang oleh suatu wilayah.
- (6) Hubungan antara kurs marjinal rupiah dan kurs valuta asing
- (7) Penguatan atas denda pajak
- (8) Pendapatan dari denda retribusi
- (9) Penghasilan dari eksekusi terkait agunan
- (10) Penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- (11) Penguatan atas denda pajak

- (12) Pendapatan dari denda
- (13) Pencapaian Pengembalian
- (14) Fasilitas Dasar dan Sosial
- (15) Hasil pengelolaan dana bergulir

2.1.6 Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU selanjutnya disebut Dana Alokasi Umum yaitu dana yang sumbernya dari pendapatan APBN dan dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan tiap daerah serta mendanai kebutuhan daerah terkait pelaksanaan Desentralisasi (Undang – Undang No 33 Tahun 2004). Tingginya penerimaan Dana alokasi umum di ikuti dengan tingginya alokasi belanja modal pada suatu daerah. Menurut Setyarini & Rustiyaningsih (2018) Dengan adanya DAU diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan mutu pelayanan masyarakat serta pembangunan daerah melalui alokasi belanja modal, sehingga daerah dapat melaksanakan desentralisasi dengan baik.

Total seluruh DAU yang ditetapkan di dalam APBN, dengan ketentuan diantaranya berikut:

- (1) Jumlah seluruh Dana Alokais Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
- (2) Proporsi dari Dana Alokasi Umum diantaranya provinsi serta kabupaten/kota dihitung melalui perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang jadi kewenangan provinsi serta kabupaten/kota.

- (3) Apabila penentuan proporsi itu belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi Dana Alokasi Umum diantaranya provinsi serta kabupaten/kota ditetapkan sesuai imbangannya 10 persen dan 90 persen

2.1.7 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu dan bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang berkaitan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang – Undang No 33 Tahun 2004).

Sebagai bagian dari program yang menjadi prioritas nasional, DAK atau Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan kepada masing-masing daerah tertentu. Tujuannya adalah untuk membantu mendukung kegiatan unik yang berkaitan dengan masalah regional.

Beberapa kewajiban yang ada melekat pada daerah penerima Dana Alokasi Khusus, sebagai berikut:

- 1) Daerah yang menerima DAK wajib memberikan alokasi dan penggunaan Dana Alokasi Khususnya pada APBD.
- 2) Terkecuali untuk daerah yang memiliki kemampuan keuangan tertentu, daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10 persen dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana pendamping tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.

3) Kepala daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus wajib menyampaikan laporan triwulan yang didalamnya memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ditetapkan Alokasi DAK per daerah. Penerapan Dana Alokasi Khusus wajib melakukan sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus yang telah dikeluarkan oleh Menteri Teknis. Dana Alokasi Khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

2.1.8 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dalam Undang Undang No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan mengatur tentang mekanisme perhitungan dan pembagian Dana Bagi Hasil, baik pajak maupun sumber daya alam. Dana Bagi Hasil adalah salah satu dana perimbangan yang juga dapat meningkatkan Belanja Modal. Sama halnya dengan dana perimbangan lainnya, penerimaan Dana bagi hasil pada suatu daerah dalam jumlah yang besar akan membuat anggaran belanja modal meningkat. Menurut Susanti & Fahlevi (2016), Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis yaitu :

- 1) Dana bagi hasil pajak yaitu DBH Pajak Bumi dan Bangunan Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10 persen untuk Pemerintah Pusat dan 90 persen untuk daerah.
- 2) Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) yaitu
 - (1) Kehutanan
 - (2) Pertambangan umum
 - (3) Perikanan
 - (4) Pertambangan minyak bumi
 - (5) Pertambangan gas bumi
 - (6) Pertambangan minyak bumi

Penyaluran Dana Bagi Hasil dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah secara triwulanan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan.

2.1.9 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya jumlah produksi terhadap barang atau jasa didalam suatu negara pada periode tertentu. statistik ekonomi makro yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan ekonomi suatu negara. Mengenai tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan regional, digunakan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. PDRB adalah total nilai produk barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi didalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa memperhitungkan kepemilikan

dan PDRB perkapita adalah hasil pembagian Produk Domestik Regional Bruto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (puspita sari surya Prabawati & Wany, 2017). Sumber daya alam, tenaga kerja, penanaman modal, kewirausahaan, komunikasi, transportasi, susunan sektor industri, teknologi, pasar ekspor, keadaan ekonomi global, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah, dan dukungan adalah beberapa variabel yang mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana. perkembangan.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama , Tahun , Judul	Variabel & Metode Analisis	Objek Penelitian & Tahun Pengamatan	Hasil
1	Noora Fahrunisah Dan Ahcmad Badjuri (2017) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi	Metode : Analisis Regresi Berganda X1: PAD X2: DAU X3: DAK Y:Belanja Modal M : Pertumbuhan Ekonomi	Objek Penelitian : Studi Empiris Pada Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2015	Terhadap Belanja Modal X1:No Signifikan X2: Signifikan X3: No Signifikan Terhadap Perumbuhan Ekonomi X1: Signifikan X2: No Signifikan X3: No Signifikan
2	Ratna Styaningrum (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum	Metode : MRA X1 : PAD X2: DAU Y:Belanja Modal	Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengahtahun 2015-2017	Terhadap Belanja Modal X1: Signifikan X2: No Signifikan

	Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi	M: Pertumbuhan Ekonomi		Terhadap Pertumbuhan Eknomi X1: No Signifikan X2 : No Signifikan
3	Mohklas , Devi Inanta Purwati Memoderasikah Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal?	Metode : MRA X1: PAD X2: DAU X3: DAK Y:Belanja Modal M: Pertumbuhan Ekonomi	Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2016	Terhadap Belanja Modal X1: Signifikan X2: Signifikan X3: Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi X1:No Signifikan X2:No Signifikan X3 : Signifikan
4	Sri Cahyaning Umi Salama (2018) <i>The Effect Of Regional Original Income, General Allocation Funds, And Results Sharing Funds On Capital Expenditure Allocation With Economic Growth As Moderating Variables In East Java Regency/City Government 2013-2015</i>	Metode : MRA X1: PAD X2: DAU X3: DBH Y:Belanja Modal M: Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Sebanyak 36.	Terhadap Belanja Modal X1: Signifikan X2: Signifikan X3: No Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi X1: No Signifikan X2: No Signifikan X3 : Signifikan

5	Jaeni, Greg. Anggana L (2016) Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal	Metode : Regresi Model Quasi Moderating Dengan Basis Interaksi X1: PAD X2 : DAK Y:Belanja Modal M: Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Yaitu 35 Kabupaten/Kota	Terhadap Belanja Modal X1: Signifikan X2:No Signifikan M: Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi X1: Signifikan
---	--	--	---	---

2.3 Hubungan Logis Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis

Margono (2004, hal 80) hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Hipotesis timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari peneliti atau diturunkan (deduced) dari teori yang telah ada. Sedangkan menurut Sugiyono (2017, hal 39) variabel Penelitian (objek penelitian) adalah atribut, kualitas, atau nilai dari individu, benda, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dan telah diidentifikasi oleh peneliti sehingga dapat diteliti dan dari situ dapat ditarik kesimpulan.

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja modal

Secara umum jenis PAD atau pendapatan asli daerah antara lain retribusi daerah, pajak badan usaha milik daerah, pajak daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang terpisah, dan pendapatan asli daerah secara sah. Tujuan dari pendapatan asli daerah itu sendiri adalah untuk membiayai otonomi daerah. Biaya otonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui belanja modal yaitu dengan pembangunan

infrastruktur , fasilitas sarana dan prasarana. Hal tersebut berarti bahwa meningkatnya suatu PAD atau pendapatan asli daerah juga mengakibatkan meningkatnya pula belanja modal. Jika aset tetap yang dimiliki daerah semakin meningkat, dapat digunakan sebagai investasi untuk sumber dana belanja modal selanjutnya, dan juga dapat membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil melaksanakan otonomi daerah Setyarini & Rustiyaningsih (2018).

Pada penelitian oleh Sulistyaningsih & Haryanto (2019) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Artinya adalah setiap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin naik, maka total pengalokasian anggaran Belanja Modal juga akan ikut meningkat, namun begitu juga sebaliknya.

Menurut Prasetyo & Isyunawardhana (2021) menunjukkan Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019. Sedangkan pada penelitian Jayanti (2020) bahwa variable (X1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya belanja modal karena disebabkan pendapatan asli daerah yang juga meningkat. Salah satu sumber daya pembiayaan belanja modal yakni adalah pendapatan asli daerah.

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Pada Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 menyebutkan Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Didalam meningkatkan infrastruktur serta sarana dan prasarananya pemerintah daerah membutuhkan banyak bantuan dana dari pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah. Hal ini juga sejalan dengan tujuan Dana Alokasi Umum yaitu memberikan pelayanan yang meningkat dan mensejahterakan masyarakat dengan lebih baik lagi melalui pengalokasian belanja modal. Artinya bahwa terdapat indikasi yang kuat bahwa belanja modal akan dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo & Isyunawardhana (2021) mengatakan bahwa Variabel dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019. Artinya adalah setiap bertambahnya satu satuan pada Dana Alokasi Umum (DAU) maka akan bertambah pula nilai belanja modal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyarini & Rustiyaningsih (2018) mengatakan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka belanja modal juga akan semakin meningkat. Sedangkan pada penelitian oleh Fathia & Rusdi (2020) menghasilkan yaitu variabel

(DAU) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal

DAK, atau Dana Alokasi Khusus, adalah dana perimbangan lainnya. Salah satu dana perimbangan dari APBN, yang disebut DAK, diberikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung inisiatif khusus yang berkaitan dengan isu-isu daerah yang penting bagi kepentingan nasional. Penggunaan DAK atau Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk kegiatan investasi dalam pembangunan atau peningkatan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik yang memiliki umur ekonomis yang panjang. Fathia & Rusdi (2020).

Pemerintah berharap terkait adanya dana alokasi khusus inilah dapat dialokasikan dengan efektif dan efisien. Maka dari itu pentingnya rancangan belanja modal untuk pembiayaan pembangunan daerah..

Hasil pada penelitian oleh Sulistyaningsih & Haryanto, (2019) disimpulkan yaitu bahwa hipotesis ketiga diterima, yang memiliki arti DAK atau Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Penelitian oleh Abid dan Rahayu dan Aminah (2018), Hasil pengujian ketiga menunjukkan Dana Alokasi Khusus signifikan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini mengartikan bahwa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menerima Dana Alokasi Khusus yang tinggi akan cenderung memiliki

belanja modal yang besar pula. Kemudian pada penelitian oleh Prasetyo & Isyunawardhana (2021), menyatakan bahwa Variabel dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019. Semakin tinggi Dana Aloksi Khusus yang diperoleh pemerintah daerah dari APBN maka pemerintah daerah tersebut dapat mengalokasikan pemanfaatan DAK untuk mendanai kebutuhan fisik agar sarana dan prasarana daerah semakin terpenuhi sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga akan semakin berkembang.

H3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.3.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil dengan Belanja Modal

Dalam Undang – Undang No 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH atau Dana Bagi Hasil ini adalah komponen yang terdiri dari dana perimbangan yang menjadi salah satu faktor pendukung dari Belanja Modal. Adanya Dana Bagi Hasil ini biaya pembangunan di daerah dapat bertambah, Sholikhah & Wahyudin (2014). Secara teoritis, jika anggaran DBH lebih besar, maka pemerintah daerah akan mampu membentuk belanja modal yang lebih besar; sebaliknya, semakin kecil anggaran DBH maka belanja modal yang akan diputuskan akan semakin kecil. Wandira (2013).

Hasil pada penelitian milik Kumala (2018), mengatakan yaitu menurut hasil variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal berdampak positif, menurut hasil analisis jalur. Hal ini menunjukkan bahwa jika PAD, DAU, DAK, dan DBH meningkat, belanja modal juga akan meningkat, yang akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian oleh Nurchayati (2021) memperoleh hasil yaitu variable Dana Bagi Hasil (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y) pada APBD Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017-2018. Hal ini menunjukkan bahwa tiap daerah yang menerima transfer DBH atau Dana Bagi Hasil yang cukup tinggi akan cenderung mempunyai alokasi belanja modal yang cukup tinggi pula. Alokasi belanja modal yang cukup tinggi akan dapat membantu dalam percepatan pelaksanaan program pembangunan di daerah, namun hal tersebut juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

H4 : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja modal

2.3.5 Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap hubungan pendapatan asli daerah pada belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya nilai dan juga jumlah produksi barang serta jasa pada suatu daerah. Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi daerah menandakan bahwa tingkat daya beli konsumsi masyarakat dan juga pendapatan perkapita yang meningkat. Apabila pendapatan masyarakat yang tinggi juga akan membuat tinggi kemampuan masyarakat dalam memberikan retribusi atau pungutan yang telah ditetapkan oleh pemda. Hal tersebut tentu saja membuat

sumber pendapatan asli daerah (PAD) juga ikut meningkat. Pertumbuhan ekonomi disuatu daerah yang meningkat juga dapat menarik perhatian investor untuk berminat dalam berinvestasi di daerah sehingga mampu mendongkrak PAD atau Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi PAD yang meningkat didalam APBD dapat digunakan untuk meningkatkan layanan publik agar lebih memadai Hardiningsih & Wakhidati (2017).

Hasil penelitian oleh Jaeni & L (2016) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi terbukti memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Sejalan dengan penelitian diatas, penelitian oleh Fahrunisah & Badjuri (2015) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi terbukti memoderasi Pendapatan Daerah ke Belanja Modal.

H5 : Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal

2.3.6 Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap hubungan Dana alokasi umum (DAU) dengan belanja modal

DAU atau Dana Alokasi Umum merupakan bagian sumber dana perimbangan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mampu mempengaruhi sumber dana perimbangan menjadi tinggi. Semakin tinggi suatu dana perimbangan yang didapat suatu daerah maka juga akan berdampak pada belanja modal yang meningkat. Belanja modal ini yang nantinya akan digunakan pemerintah dalam membiayai pembangunan daerah dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana daerahnya.

Penelitian oleh Hidayati (2016) menunjukkan hasil bahwa variabel moderasi (Pertumbuhan Ekonomi) mampu memoderasi variable DAU atau Dana alokasi umum.

H6: Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan Dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal.

2.3.7 Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap hubungan Dana alokasi khusus (DAK) dengan belanja modal

Dana Alokasi Khusus atau DAK dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi mengakibatkan semakin meningkatnya pemasukan atau pendapatan dalam suatu daerah. Penerimaan Dana alokasi pada daerah semakin tinggi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembiayaan dalam peningkatan infrastrukturnya dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam mengalokasikan dana tersebut pemerintah dapat merancang belanja modal agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien.

Purwati & Mohklas (2019) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan antara Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum namun dapat memoderasi Dana alokasi khusus dengan Belanja Modal.

H7: Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan Dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal.

2.3.8 Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap hubungan Dana bagi hasil dengan belanja modal

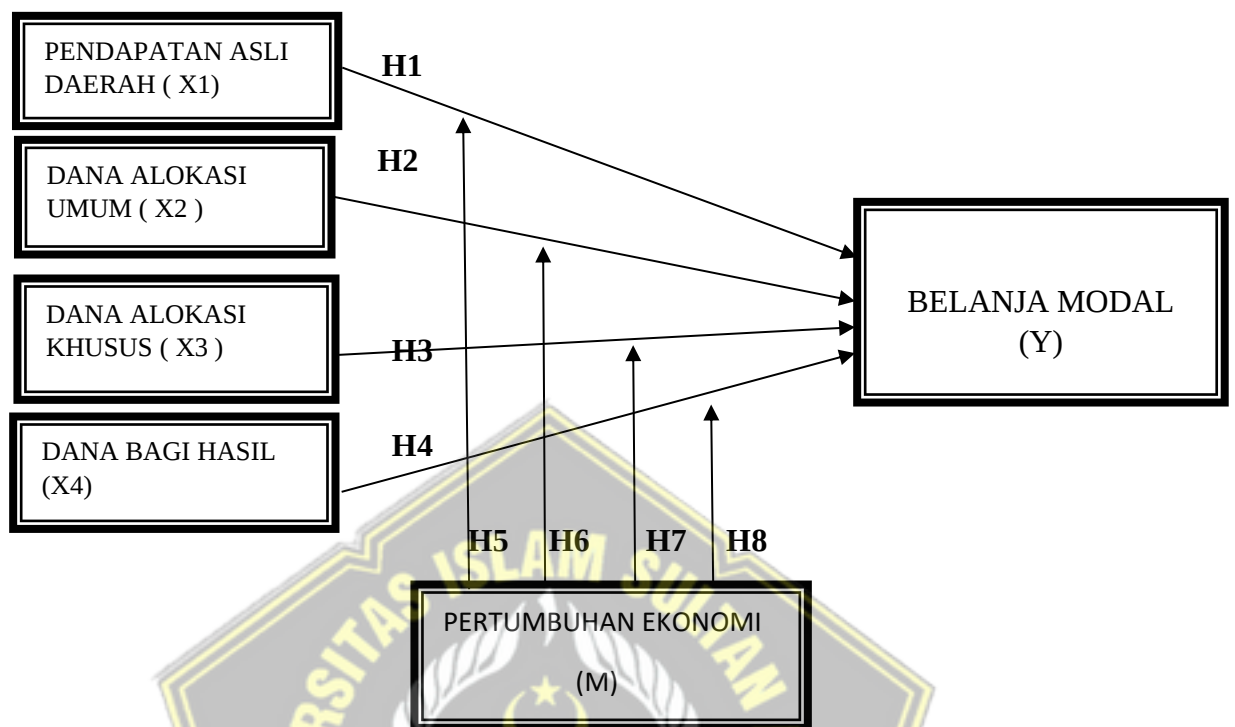
DBH atau Dana Bagi Hasil adalah salah satu sumber pendapatan daerah serta merupakan modal dasar pemerintah yang cukup potensial didalam memperoleh dana untuk pembangunan serta mencukupi belanja modal. Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi dana bagi hasil. Melalui belanja modal sumber dana dapat dialokasikan dengan baik dan benar. Sehingga tercapainya pembangunan sarana dan prasarana disuatu daerah.

Menurut penelitian oleh Prabawati & Wany (2017) memberikan hasil bahwa Variabel moderasi (pertumbuhan ekonomi) mampu memoderasi variabel Dana bagi hasil (DBH) pada belanja modal.

H8: Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh hubungan Dana bagi hasil terhadap belanja modal.

2.4 Kerangka Pemikiran

Pada Pemerintah daerah, Belanja Modal dipengaruhi oleh beberapa factor. Penelitian ini akan meneliti secara empiris variabel-variabel yang dapat mempengaruhi belanja modal. Beberapa variabel yang diduga dapat memberi pengaruh belanja modal pada penelitian ini merupakan PAD atau Pendapatan Asli Daerah, DAU atau Dana Alokasi Umum, DAK atau Dana Alokasi Khusus dan DBH atau Dana Bagi Hasil . Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran yang ada didalam penelitian ini yaitu :



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian terdapat dua jenis penelitian yaitu penelitian jenis kualitatif dan penelitian jenis kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan penelitian jenis kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah penelitian yang menggunakan pengumpulan data statistik guna dilakukan perhitungan dan interpretasi sehingga dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik dan tes hipotesis. Jenis penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam bentuk Laporan realisasi APBD yang telah diterbitkan Direktur Jendral Perimbangan Keuangan tahun 2017 – 2020, serta Laporan PDRB tahun 2017 – 2020.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti baik terbatas maupun tidak terbatas, Susanti & Fahlevi (2016). Populasi ialah data atau sesuatu yang menyeluruh dan menjadi subjek yang akan dijadikan penelitian oleh seorang peneliti. Populasi penelitian ini yaitu Kota/Kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2017- 2020.

Sampel merupakan sebagian dari obyek yang akan diselidiki dari seluruh objek yang ada. Pada penelitian ini menggunakan Teknik sampling jenuh. Salah satu pengertian dari *sampling* jenuh disampaikan oleh Sugiyono (2017), yaitu teknik menentukan sampel apabila seluruh anggota populasi akan dijadikan sampel dalam penelitian atau dapat disebut juga dengan sensus dalam lingkup kecil.

Populasi dan sampel sangat berkaitan layaknya seperti organisme (populasi) dan organ (sampel).

Menurut Arikunto (2012:104) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya. Sampel penelitian ini pada seluruh Kabupaten/Kota di Jawa tengah. Pada penelitian ini karena jumlah populasinya hanya 35 Kota/Kabupaten tidak lebih besar dari 100, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 35 Kota/Kabupaten. Demikian penelitian ini menggunakan seluruh populasi tanpa harus ditarik sampel sebagai unit observasi maka disebut sebagai teknik sensus.

3.3 Sumber dan Jenis data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah melalui Badan Pusat Statistika pada website resmi yaitu jateng.bps.go.id . Jenis data pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah ada, dan peneliti tidak perlu mengumpulkan data lagi. Biasanya data ini bisa diperoleh melalui orang lain, pemerintah jurnal, buku, sebuah dokumentasi dan lain sebagainya. Bentuk dari data sekunder dapat berupa table, grafik, ataupun diagram. Data sekunder biasanya telah diolah sebelumnya.

3.4 Metode pengumpulan data

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini untuk pengumpulan data yaitu dengan metode bentuk dokumentasi dan studi pustaka. Studi Pustaka didalamnya memuat informasi yang peneliti butuhkan untuk referensi dalam memperoleh data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jurnal, literature, skripsi, tesis dan situs internet merupakan referensi dalam studi pustaka.

3.5 Variabel dan Indikator

3.5.1 Variabel

Didalam penelitian variable sangat membantu peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah dalam penelitian. Variabel adalah objek yang ada pada penelitian dan biasanya menjadi fokus pada sebuah penelitian. Variabel terdapat beberapa jenis diantaranya yaitu variable bebas, variable terikat, variable moderator, variable antara, variable control, variable nominal dan lain lainnya. Penelitian ini menggunakan variable independen (variable bebas) , variable dependen (variable terikat) dan variable moderasi.

Variable independent (variable bebas) yaitu PAD atau Pendapatan Asli Daerah, DAU atau Dana Alokasi Umum, DAK atau Dana Alokasi Khusus, DBH atau Dana Bagi Hasil. Variable dependen (variable terikat) pada penelitian ini yaitu Belanja Modal. Sedangkan variable moderasi penelitian ini yaitu Pertumbuhan ekonomi.

3.5.2 Definisi Operasional dan Indikator

3.5.2.1 Belanja Modal

Lima bidang utama belanja modal adalah: Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin; Tanah; Jalan; Irigasi dan Jaringan; Belanja Modal Bangunan dan Konstruksi; dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Saat menyusun anggaran yang akan dikeluarkan biasanya muncul pada laporan arus kas dan tidak muncul dalam laporan laba rugi didalam laporan keuangan, artinya uang tunai akan berkurang. Sebagai kebalikan dari akun yang terkait, aktiva tetap bersih akan meningkat. Saat akan melakukan depresiasi asset selama masa manfaatnya, Biaya Penyusutan kemudian akan muncul. Maka rumus yang digunakan untuk menghitung belanja modal ialah :

Belanja Modal

: Kenaikan bersih dalam asset tetap + Beban penyusutan

Kenaikan bersih asset tetap

: Aset tetap pada akhir tahun – Aset tetap pada awal tahun

Sumber : <https://www.jojonomic.com/blog/belanja-modal-adalah/>

3.5.2.2 Pendapatan Asli Daerah

PAD atau Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan pada daerah yang terdiri dari potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Sumber penerimaan utama bagi suatu daerah adalah PAD atau Pendapatan Asli Daerah. Sumber-sumber PAD atau Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah,

hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD atau Pendapatan Asli Daerah adalah tolak ukur keberhasilan suatu daerah didalam melaksanakan fungsi pemerintahannya secara independent Heliyanto & Handayani, (2016).

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan asli daerah dapat dikelompokkan menurut jenis pendapatan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Azhar & Hermanto, (2021).

Skala rasio digunakan untuk pengukuran variable pendapatan asli daerah (PAD) yaitu dapat diukur dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{PAD} = \text{Total Pajak Daerah} + \text{Total Retribusi Daerah} + \text{Total Hasil Pengelolaan Yang Dipisahkan} + \text{Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah}$$

Sumber : Fahrunisah & Badjuri (2015)

3.5.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU atau Dana Alokasi Umum yaitu dana transferan dari pemerintah untuk pemerintah daerah dimana dana tersebut berasal dari pendapatan APB, untuk dialokasikan dan memiliki tujuan meratakan kemampuan *financial* daerah dengan

rangka melaksanakan desentralisasi. Dana Alokasi Umum diberikan kepada daerah dalam penggunaannya tergantung dengan prioritas serta kebutuhan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Komponen variable DAU yaitu Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal. Sedangkan untuk dasar pengalokasian DAU ialah :

- (1) alokasi dasar, dihitung sesuai total gaji PNS Daerah tahun sebelumnya sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang ada.
- (2) Celah fiskal, merupakan selisih antara kebutuhan fiskal & kapasitas fiskal.

Maka dari itu rumus formula untuk Dana Alokasi Umum adalah :

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

Sumber : <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/dana-alokasi-umum-dau.html>

3.5.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK, atau Dana Alokasi Khusus, adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang selanjutnya dialokasikan ke daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang berkaitan dengan urusan daerah serta bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Alokasi DAK besarnya masing masing tiap daerah ditentukan melalui perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, khusus, serta teknis. Kriteria umum sebagaimana dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNS daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dihitung dari indeks fiskal netto. Daerah yang

memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan tiap tahun. Kriteria khusus dirumuskan yaitu berdasarkan :

- (1) Peraturan perundang undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus
- (2) Karakteristik daerah.

Maka dirumuskan perhitungan Dana Alokasi Khusus ialah :

Dana Alokasi Khusus dihitung dengan Kriteria umum.

Kriteria umum dirumuskan melalui Kemampuan Keuangan Daerah.

Kemampuan Keuangan Daerah

= Penerimaan umum APBD – Belanja PNS Daerah.

Sumber : <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/dana-alokasi-khusus-dak.html>

3.5.2.5 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana yang berasal dari pendapatan APBN dimasukkan ke dalam DBH atau Dana Bagi Hasil, yang kemudian disalurkan ke daerah menurut persentase dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah sebagai bagian dari proses desentralisasi. Dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak adalah dua kategori DBH atau Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah mempunyai dua jenis yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak, Susanti & Fahlevi (2016).

Dengan skala rasio variable Dana bagi hasil dapat diukur. Kemudian perhitungannya adalah berikut :

DBH = Dana Bagi Hasil Pajak + Bukan Pajak

Sumber : <https://kemenkeupedia.kemenkeu.go.id/search/konten/9764-penetapan-dana-bagi-hasil-dbh>

3.5.2.6 Pertumbuhan Ekonomi

Pada Pertumbuhan ekonomi ini diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita yaitu indicator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah dapat diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola, mengembangkan, dan menggali potensi daerah masing-masing Purwati & Mohklas (2019).

PDRB perkapita penelitian ini diambil atas dasar harga konstan, yaitu disusun berdasarkan harga tiap tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRBt} - \text{PDRBt} - 1}{\text{PDRBt} - 1}$$

Sumber : Prabawati & Wany (2017)

Keterangan :

PDRBt = Pendapatan Domestik Regional Bruto periode t.

PDRBt-1 = Pendapatan Domestik Regional Bruto periode tahun sebelumnya t-1.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

No	Nama Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Sumber
1.	Belanja Modal	Adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.	1. Belanja Tanah 2. Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 5. Belanja Fisik Lainnya	1. PMK No 101 Tahun 2011 2. Azhar & Hermanto, (2021)
2.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Adalah pendapatan suatu daerah dari potensi yang dimiliki oleh daerah. PAD merupakan tolak ukur keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya	1. Pajak Daerah, 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Heliyanto & Handayani, (2016).

		secara independent		
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN guna dialokasikan dan memiliki tujuan meratakan kemampuan <i>financial</i> daerah dengan rangka melaksanakan desentralisasi.	1. Celah fiskal 2. Alokasi dasar	Nordiawan, Putra, & Rahmawati (2012)
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Adalah dana yang sumbernya dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan pada suatu daerah tertentu berguna membantu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.	1. Penerimaan umum APBD 2. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah	Nordiawan, Putra, & Rahmawati (2012)
5.	Dana Bagi Hasil (DBH)	termasuk dana yang asalnya bersumber dari pendapatan APBN yang selanjutnya dialokasikan kepada daerah menurut angka presentase dengan tujuan	1. Dana bagi hasil pajak 2. Dana bagi hasil bukan pajak	Susanti & Fahlevi (2016)

		memenuhi kebutuhan daerah sebagai rangka penerapan desentralisasi.		
6.	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu	- Naiknya pendapatan nasional - Pendapatan perkapita - Jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran - berkurangnya tingkat kemiskinan.	Gramedia.com/literasi

3.6 Metode Analisis

3.6.1 Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dimana berguna untuk memberikan data atau informasi tentang deskripsi dari variabel-variabel penelitian, dari variabel independen ataupun variabel dependen. Menurut Susanti & Fahlevi (2016), Karakteristik tersebut terdiri dari nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*), dan deviasi standar (*standard deviation*). Nilai minimum adalah nilai yang paling terendah, sedangkan maksimum adalah kebalikannya yaitu nilai tertinggi. Selanjutnya arti dari rata rata (*mean*) yaitu jumlah rata rata pada nilai yang diuji. Kemudian Deviasi standar (*standard deviation*) Statistik yang mengukur dalam keuangan yaitu ketika diterapkan saat tingkat pengembalian tahunan investasi. Salah satu bentuk statistika Deskriptif adalah tabel, diagram, grafik

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian terhadap asumsi klasik dilakukan sebelum dilakukannya pengujian hipotesis. Ini dikarenakan merupakan salah satu syarat untuk analisis regresi linier berganda. Beberapa Pengujian asumsi klasik yang akan dilakukan yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolenieritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Hasil uji statistik akan mengalami penurunan jika pada variable tidak dapat berdistribusi secara normal. Melalui pengujian normalitas data bisa dilakukan dengan cara memakai uji One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu adalah ketentuan jika nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Kemudian jika hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai pada signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

3.6.2.2 Uji Auto korelasi

Pada Uji ini digunakan agar dapat melihat apakah dalam model linier ada korelasi diantara kesalahan pengganggu tiap periode (t) terkait kesalahan pengganggu pada periode (t-1) sebelumnya. Apabila terdapat korelasi, maka disebutkan ada masalah autokorelasi. Model yang benar adalah model yang terbebas autokorelasi. Terdapat cara yang digunakan agar mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah menggunakan Run Test. Untuk menguji apakah antar residual terdapat

korelasi yang tinggi maka menggunakan Run Test sebagai dari statistic non parametrik. Apabila antar residual tidak ada interaksi korelasi maka dapat disebutkan yaitu residual merupakan acak atau random. Untuk mengetahui apakah data residual terjadi secara acak atau tidak sistematis menggunakan Run test. Pengambilan Keputusan pada uji Run Test sebagai berikut:

- (1) Jika hasil uji Run Test menunjukkan nilai pada signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dapat diartikan jika residual tidak random atau terjadi autokorelasi antar nilai residual.
- (2) Jika hasil Uji Run Test menunjukkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan jika residual random atau tidak ada autokorelasi antar nilai residual

3.6.2.3 Uji Multikolenieritas

Menurut Ghazali (2016) pada uji multikolinearitas memiliki tujuan agar mengetahui apakah model regresi terjadi korelasi antara variabel independent atau variable bebas. Pengaruh dari multikolinearitas yaitu membuat tingginya variabel pada sampel penelitian. Hal ini memiliki arti standar error tinggi, efeknya ketika koefisien akan diuji, t-hitung maka bernilai kecil dari t-tabel. Hal tersebut memberikan tidak adanya interaksi linear diantara variabel independen yang terpengaruhi dengan variabel dependen. Untuk ditemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat dilihat melalui nilai toleransi serta nilai VIF atau variance inflation factor. Nilai Tolerance menghitung variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Sehingga nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF atau variance inflation factor

yang tinggi, dikarenakan $VIF = 1/\text{tolerance}$, dan memperlihatkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang digunakan adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10.

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas diterapkan dengan melihat pola grafik scatterplot. Hasil dari grafik scatterplot menunjukkan adanya titik yang menyebar secara random dan menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak ada pola tertentu yang teratur. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa tidak ada heteroskedastisitas pada model regresi ini. Azhar & Hermanto, (2021).

3.6.3 Pengujian Hipotesis

3.6.3.1 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Menurut Ghozali (2016) Moderate Regression Analysis (MRA) menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh moderator. MRA adalah aplikasi khusus regresi linier berganda dimana dalam persamaan regresinya memiliki unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variable independent). Dalam menguji suatu variable yang termasuk moderasi dapat dilakukan dengan uji interaksi antar variable.

Model persamaan moderate regression analysis (MRA) yaitu sebagai berikut :

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + B_5X_1Z + B_6X_2Z + B_7X_3Z + B_8X_4Z + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

a = Konstants

B_1 - B_8 = Koefisien regresi masing masing variable bebas

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X_3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

X_4 = Dana Bagi Hasil (DBH)

Z = Pertumbuhan Ekonomi

$X_1 Z$ = Interaksi antara PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi

$X_2 Z$ = Interaksi antara DAU dengan Pertumbuhan Ekonomi

$X_3 Z$ = Interaksi antara DAK dengan Pertumbuhan Ekonomi

$X_4 Z$ = Interaksi antara DBH dengan Pertumbuhan Ekonomi

e = Standar Error

3.6.3.2 Uji t

Pengujian (t) biasanya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel terikat, Ghazali (2011).

Pengujian parsial regresi dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempunyai pengaruh pada variabel terikat dengan asumsi variabel yang lain itu konstan. Pengaruh setiap variabel independen dengan variabel dependen bisa diketahui dari besarnya p-value. Apabila nilai lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka variabel independent memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

3.6.3.3 Uji F

Pengujian (F) digunakan agar dapat mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. Namun, apabila nilai pada signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.6.3.4 Uji R²

Pengujian (R²) atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel independent yaitu memberi penjelasan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksikan variabel independent, Ghazali (2011).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada penelitian ini tentang pengaruh PAD atau Pendapatan Asli Daerah , DAU atau Dana Alokasi Umum, DAK atau Dana Alokasi Khusus, DBH atau Dana Bagi Hasil terhadap Belanja modal dengan Pertumbuhan ekonomi sebagai variable moderasi. Penelitian ini menggunakan enam variabel dimana terdapat empat variabel bebas (Independen) yang disimbolkan dengan X^1 yaitu PAD, X^2 yaitu DAU, X^3 yaitu DAK, dan X^4 yaitu DBH , kemudian satu variable terikat (Dependen) disimbolkan dengan Y^1 yaitu Belanja modal, dan satu variable moderasi yaitu M^1 Pertumbuhan ekonomi.

Bab ini akan membahas mengenai tahap tahap dan pengolahan data yang selanjutnya akan dianalisis tentang pengaruh PAD,DAU,DAK,DBH pada belanja modal dan variable moderasi pertumbuhan ekonomi. Sampel penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2017 – 2020 yang ditentukan dengan metode sampling jenuh atau sensus, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Pada penelitian ini memilih objek Pemerintah Provinsi Jawa tengah selama lima tahun berturut turut (2017 – 2020) Jumlah sampel yang diperoleh adalah 35 yang merupakan 29 kabupaten dan enam kota di Provinsi Jawa tengah. Sehingga jumlah sampel yang akan digunakan berjumlah 140 data (35 x 4).

Berikut dibawah ini adalah data hasil penelitian sampel :

Tabel 4. 1 Jumlah Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1.	Seluruh Kabupaten Provinsi Jawa Tengah periode 2017 - 2021	29
2.	Seluruh Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2017 - 2021	6
	Jumlah sampel	35
	Tahun Pengamatan (2017 – 2020)	4
	Jumlah sampel	140

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Pada analisis statistik deskriptif ini memiliki tujuan yaitu menunjukkan gambaran pada data bisa dilihat melalui nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi serta distribusi frekuensi data. Pada penelitian ini memiliki tiga variabel diantaranya adalah *variable independen* seperti pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Kemudian ada *variable dependen* yaitu belanja modal serta *variable moderasi* yaitu pertumbuhan ekonomi. Berikut dibawah ini hasil perhitungan uji statistik deskriptif menggunakan SPSS 23 yaitu :

Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif :

(Ribu Rupiah)	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
PAD	131	28004745	2516646593	272177421.84	267950114.08
DAU	131	79573628	10490169118	1036557605.3	873820683.91
DAK	131	0	543730018	303428810.40	111940056.50
DBH	131	22893650	246044588	46945888.53	40115885.124
BELANJA MODAL	131	113622509	1054761428	364472465.20	142088321.21
PERTUMBUHAN EKONOMI	131	5820532.00	140199517.40	25845261.141	22445694.986
Valid N (listwise)	131				

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022.

Melihat tabel diatas, menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 131 unit penelitian (N) setelah ada pengurangan dengan *outlier*. Data tersebut merupakan Kota/Kabupaten di Jawa Tengah selama empat tahun pengamatan yaitu 2017 – 2020. Disetiap tahunnya terdapat 35 Kota/Kabupaten di Jawa tengah, sehingga jumlah sampel menjadi 140 unit, yang kemudian dikurangi sebanyak sembilan unit karena pengujian *outlier* dan jumlah akhir yang didapat adalah 131 unit penelitian.

Pada penelitian ini variable moderatingnya adalah Pertumbuhan Ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi merupakan seperti kegiatan didalam perekonomian yang mengakibatkan produksi produk dan jasa meningkat dan membuat peningkatan terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang terus bertambah disetiap tahunnya juga merupakan salah satu tujuan pemerintah daerah.

Semua variable yang ada penelitian ini dilakukan uji statistic deskriptif mulai dari variable independent, variable dependen, dan juga variable moderasi. Melalui pengujian statistic deskriptif tersebut memberikan hasil yaitu :

- Pada table diatas untuk varibel independent PAD memiliki nilai minimum sebesar Rp 28.004.745.000 dan nilai maximum sebesar Rp 2.516.646.593.000, artinya bahwa daerah yang ada di Provinsi Jawa tengah selama 2017 – 2020 yang memiliki pendapatan asli daerah terendah ada pada Kabupaten Blora tahun 2017, dan nilai tertinggi pada Kota Semarang tahun 2020. Nilai rata rata PAD Provinsi Jawa Tengah selama 2017 – 2020 adalah Rp 272.177.421.8 dan nilai standard deviasi nya sebesar Rp 267.950.114,08 karena nilai standar deviasinya lebih kecil dari *mean* maka dapat diartikan jika penyebaran data sampel Pendapatan Asli Daerah sangat kecil terhadap rata rata dan data berdistribusi baik.
- Melihat pada tabel diatas penerimaan Dana Alokasi Umum di Pemerintah Jawa Tengah selama 2017 -2020 paling rendah pada Kabupaten Rembang tahun 2019 sebesar Rp 79.573.628.000 dan penerimaan paling tinggi sebesar Rp 10.490.169.118.000 pada Kabupaten Sragen tahun 2017. Sedangkan nilai *mean* untuk Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama 2017 – 2020 yaitu Rp 1.036.557.605,3 lebih besar dari nilai standar deviation sebesar Rp 873.820.683,91, artinya bahwa data variasi Dana Alokasi Umum menyebar sangat kecil terhadap rata ratanya. dan data berdistribusi dengan baik.

- Penerimaan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama 2017 – 2020 pada tabel diatas memberikan hasil yaitu penerimaan paling rendah sebesar Rp 0 pada tahun 2019 Kabupaten Kudus serta tahun 2020 Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Kudus. Kemudian untuk penerimaan paling tingginya sebesar Rp 543.730.018.000 di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020. Sedangkan untuk nilai *mean* yaitu Rp 303.428.810,40 dan nilai Std.Deviation sebesar Rp 111.940.056,50. Melalui hasil ini diketahui bahwa nilai standar deviasinya lebih kecil daripada nilai *mean*, artinya penyebaran data sampel yang digunakan yaitu variasi dana alokasi khusus sangat kecil.
- DBH atau Dana Bagi Hasil Pemerintah Probvinsi Jawa Tengah 2017 hingga 2020 pada tabel diatas memberikan hasil yaitu nilai terendah sebesar Rp 22.893.650.000 ada pada Kota Salatiga pada tahun 2020 dan untuk nilai tertinggi yaitu Rp 246.044.588.000 di Kabupaten Kudus pada tahun 2017. Sedangkan untuk nilai *mean* pada tabel menunjukkan sebesar Rp 46.945.888,53 lebih besar dari nilai standar deviation yaitu Rp 40.115.885,124 yang memberikan arti bahwa penyebaran data sampel dana bagi hasil kecil terhadap rata ratanya dan data berdistribusi baik.
- Pada tabel diatas nilai Belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2017 hingga 2020 yaitu nilai terendahnya ada pada Kota Tegal tahun 2018

sebesar Rp 113.622.509.000 dan untuk nilai tertinggi nya sebesar Rp 1.054.761.428.000 pada Kota Semarang tahun 2019. Kemudian untuk nilai mean sebesar Rp 364.472.465,20 dan nilai standar deviation sebesar Rp 142.088.321,21. Melihat dari nilai mean yang lebih besar dari nilai standar deviation memiliki arti yaitu penyebaran data sampel belanja modal kecil terhadap rata ratanya dan data berdistribusi baik.

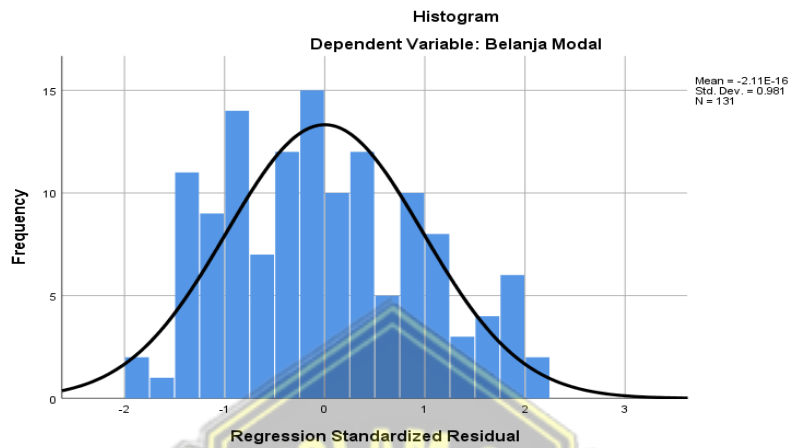
- Variable moderasi Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah selama 2017 – 2020 memiliki nilai terendah sebesar Rp 5.820.532.000 ada pada Kota Magelang tahun 2017 dan untuk nilai tertingginya sebesar Rp 140.199.517.400 pada Kota Semarang tahun 2019. Dari tabel diatas menghasilkan bahwa penyebaran data sampel pertumbuhan ekonomi menyebar lebih besar dari rata rata, karena nilai standar deviasinya lebih besar yaitu Rp 22.445.694.986 dari nilai mean sebesar Rp 2.5845.261.141.

4.3 Asumsi Klasik

4.3.1 Uji normalitas

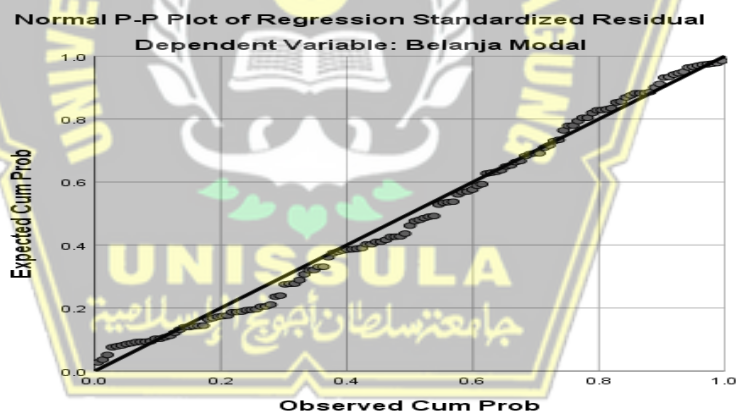
Pengujian normalitas pada data digunakan guna mengukur data penelitian, apakah data berdistribusi tersebut normal atau tidak. Pengujian ini bisa dilakukan dengan uji normalitas, menggunakan *grafik histogram* dan *normal probability lot (P-Plot)* melalui uji *Kolmogrov-Sminorv*. Untuk mengkonfirmasi apakah distribusi dari sebaran data normal atau tidak, bisa

dilakukan dengan uji *Kolmogrov-Sminorv Test* yang syarat nilai signifikan (2-tailed) $> 0,05$ dapat diartikan bahwa sebaran data berdistribusi normal.



Sumber : Data yang diolah, 2022

Gambar 4. 1 Histogram



Sumber : Data yang diolah, 2022

Gambar 4. 2 Normal P-P Plot

Tabel 4. 3 One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		131
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	81080367.44092160
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.076
	Negative	-.049
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.058 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data yang diolah,2022

Hasil uji normalitas dengan histogram menunjukkan bahwa pola sebaran residual menyebar mengikuti pola sebaran normal, berdasarkan normal p-plot menunjukkan sebaran residual berawal dari kiri bawah menuju kanan atas mengikuti garis sebaran normal dan berdasarkan uji kolomogrov Smirnov diperoleh nilai pada signifikansi yaitu 0,058 lebih tinggi dari α (0,05). Dari ketiga kriteria tersebut maka dapat disimpulkan bahwa residual telah menyebar normal (asumsi terpenuhi).

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas merupakan antar variabel bebas dalam model regresi yang memiliki hubungan *linier* mendekati sempurna atau sempurna. Dinyatakan model regresi yang baik yaitu tidak terdapat korelasi diantara variabel bebasnya dan untuk mengetahui ada atau tidak terjadinya gejala *multikolinieritas* dapat menggunakan

nilai *VIF* atau *Variance Inflation Factor* dan *Tolerance*, jika nilai *VIF* kurang dari 10 dan *Tolerance* lebih dari 0,1 dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas (Harianja, Harahap, & Zein, 2020).

Tabel 4. 4 Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	.405	2.471
	DAU	.922	1.084
	DAK	.754	1.327
	DBH	.465	2.149
	Pertumbuhan Ekonomi	.239	4.184

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data yang diolah, 2022.

Hasil dari perhitungan VIF untuk seluruh variabel independent diperoleh nilai VIF untuk variabel PAD sebesar 2,471. Variabel DAU sebesar 1,084. Variabel DAK yaitu 1,327. Variabel DBH sebesar 2,149 serta variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,184. Maka dari itu diperoleh kesimpulan tidak terjadi gejala Multikolinieritas (asumsi terpenuhi).

4.3.3 Uji Autokorelasi

Asumsi standar autokorelasi, yaitu korelasi antara residual dalam satu observasi dengan data lain dalam model regresi, berguna untuk menentukan ada atau tidaknya penyimpangan dari asumsi tersebut. Syarat yang harus terpenuhi yaitu tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Ukuran dalam memutuskan ada tidaknya masalah autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson* (uji *D-W*),

ketentuan nilai *DW* lebih besar dari - 2 dan lebih kecil dari +2 (Harianja, Harahap, & Zein, 2020).

Tabel 4. 5 Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.821 ^a	.674	.661	82686075.150	1.670
a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, DBH, PAD					
b. Dependent Variable: Belanja Modal					

Sumber : Data yang diolah, 2022.

Hasil perhitungan nilai *dw* (durbin watson) diperoleh yaitu 1,670. Nilai diatas berada pada rentang -2 hingga +2, maka dari itu dapat diartikan jika tidak terdapat gejala Autokorelasi pada residual (asumsi terpenuhi).

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan atau perbedaan varian dari residual untuk semua data dalam model regresi maka akan digunakan uji heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan *uji scartterplot*, sehingga dapat melihat hasil dari variabel bebas terhadap absolut dari residualnya, serta melakukan konfirmasi pada model regresi yang dilanjutkan dengan uji *glejser* dengan syarat nilai *sign.* > 0,05 yang berarti model regresi tidak mengalami heteroskedastitas.

Tabel 4. 6 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a		
Model	t	Sig.
1 (Constant)	4.018	.000
PAD	.292	.771
DAU	-1.219	.225
DAK	1.520	.131
DBH	-.322	.748
Pertumbuhan Ekonomi	-.267	.790
a. Dependent Variable: ABS		

Sumber : Data yang diolah, 2022

Hasil perhitungan nilai signifikansi pengaruh variabel independent terhadap nilai multak residual diperoleh bahwa seluruh nilai signifikansi lebih besar dari α (0,05). Maka dari itu bisa diartikan bahwa tidak ada gejala hetereskedastisitas pada residual (asumsi terpenuhi).

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Uji F

Uji (F) dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara serentak (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Berikut hasil uji statistic F yaitu :

Tabel 4. 7 Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	17759772931819	8	221997161647	31.916	.001 ^b
	58660.000		744832.000		

	Residual	84860453979728 4220.000	122	695577491637 1182.000		
	Total	26245818329792 43000.000	130			
a. Dependent Variable: BELANJA MODAL						
b. Predictors: (Constant), X4*Z, DAU, DAK, PAD, X3*Z, DBH, X1*Z, X2*Z						

Sumber : Data yang diolah, 2022

Melalui tabel 4.7 hasil dari perhitungan uji statistic uji f (uji simultan) memberikan hasil yaitu nilai signifikansi yaitu 0,001 memberikan arti nilai pada signifikansi ini lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Melalui hasil ini memberikan arti bahwa terdapat pengaruh PAD,DAU,DAK,DBH, (PAD*Pertumbuhan Ekonomi), (DAU* Pertumbuhan Ekonomi), (DAK*Pertumbuhan Ekonomi), (DBH * Pertumbuhan Ekonomi) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4.4.2 UJI T

Uji (T) biasanya digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Berikut hasil perhitungan Uji t :

Tabel 4. 8 Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37466027.409	38206847.581		.981	.329
	PAD	.282	.111	.532	2.537	.012
	DAU	.004	.053	.026	.079	.937
	DAK	.613	.166	.483	3.694	.001
	DBH	1.148	.596	.324	1.925	.057
	X1*Z	6.088E-10	.000	.172	.724	.470
	X2*Z	-2.161E-10	.000	-.054	-.099	.921

	X3*Z	-1.683E-9	.000	-.109	-.291	.772
	X4*Z	-5.716E-9	.000	-.155	-.574	.567
a. Dependent Variable: BELANJA MODAL						

Sumber : Data yang diolah, 2022

Melalui tabel 4.8 diatas , hasil analisis uji statistik t tersebut adalah sebagai berikut :

- Variabel PAD nilai (t) hitung memiliki yaitu 2,537 serta nilai signifikansinya yaitu 0,012 lebih tinggi dari 0,05. Artinya bahwa variabel PAD pengaruh positif terhadap Belanja modal.
- Variabel DAU nilai (t) hitung yaitu sebesar 0,079 dan nilai signifikansinya sebanyak 0,937 yang lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa variabel DAU tidak berpengaruh positif terhadap Belanja modal.
- Variabel DAK memiliki nilai (t) hitung sebanyak 3,694 dan nilai signifikansinya yaitu 0,001 yang lebih rendah dari 0,05. Artinya adalah variabel DAK pengaruh positif terhadap Belanja modal.
- Variabel DBH memiliki nilai (t) hitung yaitu 1,925 kemudian nilai signifikansinya sebanyak 0,057 yang lebih tinggi dari 0,05. Artinya ialah variabel DBH tidak berpengaruh positif terhadap Belanja modal.
- Interaksi antara PAD dengan Belanja Modal dan dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai (t) hitung sebesar 0,724 dan signifikansinya sebanyak 0,470 yang lebih tinggi dari 0,05. Artinya yaitu variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi interaksi PAD terhadap Belanja modal.

- Interaksi antara DAU dengan Belanja Modal yang dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai (t) hitung adalah -0,099 dan signifikansinya ialah 0,921 yang lebih tinggi dari 0,05. Artinya adalah variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi interaksi DAU terhadap Belanja modal.
- Interaksi antara DAK dengan Belanja Modal dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai (t) hitung sebesar -0,291 dan signifikansinya adalah 0,772 yang lebih tinggi dari 0,05. Artinya variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi interaksi DAK terhadap Belanja modal.
- Interaksi antara DBH dengan Belanja Modal yang dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai (t) hitung ialah -0,574 dan signifikansinya yaitu 0,567 yang lebih tinggi dari 0,05. Artinya adalah variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi interaksi DBH terhadap Belanja modal.

Tabel 4. 9 Ringkasan Hasil Uji T :

No	Hipotesis	Nilai t-hitung	Signifikansi	Keterangan
1	PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal	2,537	0,012	Diterima
2	DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal	0,079	0,937	Ditolak
3	DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal	3,694	0,001	Diterima
4	DBH berpengaruh terhadap Belanja Modal	1,925	0,057	Ditolak
5	Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi hubungan PAD terhadap Belanja Modal	0,724	0,470	Ditolak
6	Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi	-0,099	0,921	Ditolak

	hubungan DAK terhadap Belanja Modal			
7	Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi hubungan DAK terhadap Belanja Modal	-0,291	0,772	Ditolak
8	Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi hubungan DBH terhadap Belanja Modal	-0,574	0,567	Ditolak

Sumber : Data yang diolah, 2022

4.4.3 Uji Moderating Regression Analysis (MRA)

MRA adalah aplikasi atau sistem terkhusus regresi linier berganda dimana dalam persamaan regresi memiliki unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variable independent). Dalam menguji suatu variable yang termasuk moderasi dapat dilakukan dengan uji interaksi antar variable. Berikut hasil perhitungan Uji MRA yaitu :

Tabel 4. 10 Uji MRA

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37466027.409	38206847.581		.981	.329
	PAD	.282	.111	.532	2.537	.012
	DAU	.004	.053	.026	.079	.937
	DAK	.613	.166	.483	3.694	.001
	DBH	1.148	.596	.324	1.925	.057
	X1*Z	6.088E-10	.000	.172	.724	.470
	X2*Z	-2.161E-10	.000	-.054	-.099	.921
	X3*Z	-1.683E-9	.000	-.109	-.291	.772
	X4*Z	-5.716E-9	.000	-.155	-.574	.567
a. Dependent Variable: BELANJA MODAL						

Sumber : Data yang diolah, 2022.

Persamaan regresi :

$$Y = 37466027,409 + 0,282X_1 + 0,004X_2 + 0,613X_3 + 1,148X_4 + 6,088E-10X_{1Z} - 2,161E-10X_{2Z} - 1,683E-9X_3 - 5,716E-9X_4 + e$$

Melalui persamaan regresi diatas, maka hasil koefisien regresi pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

- Nilai konstanta yaitu sebesar 37466027,409 apabila variabel independent dianggap konstan maka rata rata Belanja Modal 37466027,409.
- Variabel PAD memiliki koefisien regresi yaitu 0,282. Artinya adalah jika setiap kenaikan satu PAD akan terjadi peningkatan Belanja Modal sebanyak 0,282 dan syarat variabel Independen lainnya harus konstan.
- Variabel DAU mempunyai koefisien regresi sebanyak 0,004. Artinya jika setiap kenaikan satu DAU akan terjadi peningkatan Belanja Modal sebanyak 0,004 dengan syarat variabel Independen lainnya harus konstan.
- Variabel DAK mempunyai koefisien regresi sebanyak 0,613. Artinya jika setiap kenaikan satu DAK akan terjadi peningkatan Belanja Modal sebesar 0,613 dengan syarat variabel Independen lainnya harus konstan.
- Variabel DBH mempunyai koefisien regresi yaitu 1,148. Bermakna bahwa jika setiap kenaikan satu DBH akan terjadi peningkatan Belanja Modal sebesar 1,148 dengan syarat variabel Independen lainnya harus konstan.
- Interaksi Pertumbuhan Ekonomi terhadap pengaruh PAD dengan Belanja Modal memiliki koefisien regresi sebesar 6,088E-10. Artinya bahwa jika setiap kenaikan satu PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi akan terjadi

peningkatan Belanja Modal sebesar $6,088E-10$ dengan syarat variabel Independen lainnya harus konstan.

- Interaksi Pertumbuhan Ekonomi terhadap pengaruh DAU dengan Belanja Modal memiliki koefisien regresi sebesar $-2,161E-10$. Artinya bahwa jika setiap kenaikan satu DAU dengan Pertumbuhan Ekonomi akan terjadi penurunan Belanja Modal sebesar $-2,161E-10$ dengan syarat variabel Independen lainnya harus konstan.
- Interaksi Pertumbuhan Ekonomi terhadap pengaruh DAK dengan Belanja Modal memiliki koefisien regresi sebesar $-1,683E-9$. Artinya bahwa jika setiap kenaikan satu DAK dengan Pertumbuhan Ekonomi akan terjadi penurunan Belanja Modal yaitu $-1,683E-9$ dengan syarat variabel Independen lainnya harus konstan.
- Interaksi Pertumbuhan Ekonomi terhadap pengaruh DBH dengan Belanja Modal memiliki koefisien regresi sebesar $-5,716E-9$. Artinya bahwa jika setiap satuan DBH dengan Pertumbuhan Ekonomi akan terjadi Penurunan Belanja Modal sebesar $-5,716E-9$ dengan syarat variabel Independen lainnya harus konstan.

4.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Koefisien Determinasi

ada pada tabel *Model Summary* dikolom *Adjusted R Square* . Berikut hasil pengujiannya yaitu :

Tabel 4. 11 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.823 ^a	.677	.655	83401288.458
a. Predictors: (Constant), X4Z, DAU, DAK, PAD, X3Z, DBH, X1Z, X2Z				

Sumber : Data yang diolah, 2022.

Menurut tabel 4.11 maka ditunjukkan bahwa nilai pada Adjusted R Square memiliki nilai yaitu 0,655 atau 65,5%. Hal tersebut berarti 65,5% variabel Independen bisa memperlihatkan variasi variabel dependen. Maka variabel Independen PAD, DAU, DAK, dan DBH dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi dapat menjelaskan Belanja Modal sebanyak 65,5%. Selain itu untuk sisa yaitu 34,5% diperjelas dengan variabel lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Melalui penelitian ini hipotesis pertama yaitu bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pada suatu daerah dengan memanfaatkan

sumber daya yang dimilikinya. Meningkatnya suatu pendapatan daerah maka akan meningkat pula anggaran dalam Belanja Modal suatu daerah, yang nantinya dapat berguna untuk penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Pada tabel uji T diatas, terkait variabel PAD terhadap Belanja Modal memberikan hasil yaitu variabel PAD mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,282 dan nilai signifikansinya sebesar 0,012 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Berdasarkan nilai signifikansi tersebut maka H_1 yaitu PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal diterima. Hasil ini mendukung teori agensi yang telah dijelaskan diatas yaitu hubungan antara masyarakat sebagai *principal* berperan untuk membayarkan kewajibannya dengan pemerintah daerah sebagai *agent* berperan mempunyai tanggung jawab menyediakan pelayanan yang memadai (*public service*) kepada masyarakat dengan mengelola pendapatan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan lurus dengan penelitian oleh Styanningrum (2020) serta juga penelitian oleh Mokhlis & Purwati (2019) yang memberikan hasil bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Fahrudin & Badjuri (2019) yang memberikan hasil yaitu pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki pengaruh terhadap Belanja modal. Tentunya didalam menyediakan pelayanan kepada publik akan semakin memadai serta pengalokasian dananya meluas sehingga mampu mencukupi belanja modal atau yang lainnya. Pelayanan publik yang diberikan dapat berupa pembangunan daerah, meningkatkan fasilitas

masyarakat, dan memberikan sarana dan prasarana yang baik. Jika hal ini berjalan secara membaik akan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

4.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Hipotesis kedua di penelitian ini adalah DAU atau Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dengan Belanja Modal. DAU (Dana alokasi umum) yaitu dana yang sumber nya dari APBN guna keuangan yang merata dan mendanai kebutuhan daerah. Melalui tabel Uji T diatas, variabel DAU memiliki nilai koefisien regresi yaitu 0,004 dan nilai pada signfikansi yaitu 0,937 lebih besar dari 0,05. Hal ini memiliki arti bahwa H_2 yaitu Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja modal ditolak. Hal tersebut tidak mampu mengkonfirmasi teori agensi, yang menyatakan bahwa pemerintah pusat sebagai *principal* berperan memberikan dana perimbangan (Dana Alokasi Umum) kepada pemerintah daerah sebagai *agent*, dalam tanggung jawabnya untuk mengelola dana perimbangan dan dialokasikan kedalam belanja modal.

Hasil penelitian ini selurus dengan penelitian oleh Styaningrum (2020) dan Simbolon et al., (2020) yang memberikan hasil yaitu Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun penelitian ini bertolak dengan penelitian milik Prabawati & Wany (2018) serta Mohklas & Purwati (2019) yang menghasilkan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dana alokasi umum yang tidak mempengaruhi belanja modal karena dana ini merupakan dana transfer dari pemerintah pusat bersifat *block grant* yaitu dana yang diberikan sesuai dengan penggunaan dan prioritas tiap daerah yang berbeda serta jumlah yang diberikan tidak besar. Sehingga hal ini membuat pengaruh dalam

belanja modal juga tidak terlalu signifikan. Mengenai hasil ini, Dana Alokasi Umum tidak dapat menjadi tolak ukur pengalokasian dalam anggaran belanja modal.

4.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.

Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pada tabel Uji T diatas, variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,613 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Dari nilai signifikansi tersebut memberikan hasil yaitu H_3 bahwa Dana Aloaksi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja modal diterima. Hasil tersebut mampu mengkonfirmasi teori agensi yaitu menyatakan bahwa pemerintah pusat sebagai *principal* berperan memberikan dana perimbangan (Dana Alokasi Khusus) kepada pemerintah daerah sebagai *agent*, dalam tanggung jawabnya untuk mengelola dana perimbangan dan dialokasikan kedalam belanja modal.

Hal ini juga memberikan arti yaitu Dana Alokasi Khusus dapat menjadi indikator tolak ukur dalam pengaruh Belanja Modal. Jumlah penerimaan Dana Alokasi Khusus yang besar akan berpengaruh besarnya anggaran dalam Belanja modal. Sehingga pemerintah dalam menyediakan pelayanan untuk publik akan lebih meluas dan merata.

Hasil penelitian ini selurus terhadap hasil penelitian milik Mokhlas & Purwati (2019) dan Simbolon et al.(2020) yaitu dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Namun hasil ini tidak sebanding dengan penelitian

oleh Fahrunisah & Badjuri (2019) dan Jaeni & L (2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4.5.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Penelitian ini pada hipotesis keempat memberikan hasil yaitu Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang diberikan kepada daerah dengan presentase tertentu yang sumbernya berasal dari APBN melalui pajak dan kekayaan daerah. Semakin meningkat Dana Bagi Hasil yang diperoleh dari pemerintah pusat maka akan berpengaruh kedalam Belanja Modal daerah tersebut. Melihat dari pengujian pada tabel uji t diatas, memberikan hasil yaitu pada variabel Dana Bagi Hasil mempunyai koefisien regresi yaitu 1,148 dan nilai signifikansi sebesar 0,057 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini bermakna bahwa H_4 yaitu Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal ditolak. Melalui hasil ini tidak mampu mendukung teori agensi yaitu bahwa pemerintah pusat sebagai *principal* berperan memberikan dana perimbangan (Dana Bagi Hasil) kepada pemerintah daerah sebagai *agent*, dalam tanggung jawabnya untuk mengelola dana perimbangan dan dialokasikan kedalam Belanja Modal.

Hasil penelitian ini selurus penelitian milik Prabawati & Wany (2017) serta Salama (2018) yang memberikan hasil yaitu Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan yang diteliti oleh Simbolon et al., (2020) memberikan hasil bahwa Dana Bagi hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Dana Bagi Hasil tidak mempengaruhi, dapat terjadi karena pemerintah daerah sudah mampu mencukupi kebutuhannya sendiri (mandiri), tanpa bergantung kepada pemerintah pusat, sehingga Dana Bagi Hasil tidak dipergunakan didalam memenuhi Belanja Modalnya.

4.5.5 Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.

Melalui penelitian ini, hipotesis kelima menyatakan Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. berdasarkan pengujian pada tabel diatas, interaksi variabel Pertumbuhan Ekonomi dengan PAD mempunyai koefisien regresi yaitu $6,088E-10$ dan nilai signifikansi sebesar 0,470 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa H_5 yaitu Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal ditolak. Hal ini tidak mampu mengkonfirmasi teori agensi bahwa hubungan antara masyarakat sebagai *principal* berperan untuk membayarkan kewajibannya dengan pemerintah daerah sebagai *agent* berperan mempunyai tanggung jawab menyediakan sarana prasarana yang baik (*public service*) kepada masyarakat dengan mengelola pendapatan tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi interaksi PAD terhadap Belanja Modal, karena tingkat Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak merata dan terjadi adanya kesenjangan masing-masing wilayah, sehingga Pertumbuhan Ekonomi tidak memberikan pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap Belanja modal karena dengan adanya PAD tersebut pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan sarana dan

fasilitas yang cukup, namun sarana dan prasarana yg tersedia tidak merata dan kurang menunjang sepenuhnya sehingga kegiatan perekonomian masyarakat tidak berjalan dengan lancar. Hal tersebut menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki peningkatan dan tidak berpengaruh terhadap suatu daerah. Pemerintah daerah lebih menggunakan PAD untuk memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Penelitian ini selurus penelitian milik Styaningrum (2020) dan Prabawati & Wany (2018) yaitu Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Namun sebaliknya penelitian oleh Jaeni & L (2016) serta Simbolon et al., (2020) memberikan hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

4.5.6 Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.

Hipotesis keenam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Menurut pada tabel diatas interaksi variabel Pertumbuhan Ekonomi dengan Dana Alokasi Umum mempunyai koefisien yaitu $-2,161E-10$ dan nilai pada signifikansi adalah 0,921 lebih besar dari nilai koefisien 0,05. Memiliki arti yaitu H_6 yaitu Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal ditolak pada penelitian ini. Artinya hasil ini tidak dapat mengkonfirmasi teori agensi hubungan antara masyarakat sebagai *principal* berperan untuk membayarkan kewajibannya

dengan pemerintah daerah sebagai *agent* berperan mempunyai tanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang baik (*public service*) untuk masyarakat dengan mengelola pendapatan tersebut. Kabupaten dan kota justru menggantungkan keuangan daerahnya melalui DAK atau Dana Alokasi Umum ini karena peran Dana Alokasi Umum sebagai *equalization grant* adalah untuk mengimbangi ketimpangan kemampuan keuangan suatu daerah. Akibatnya, kemandirian di suatu daerah menjadi lebih baik.

Penelitian ini selurus dengan penelitian oleh Prabawati & Wany (2017) serta penelitian oleh Cahyaning (2018) yaitu Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Namun penelitian oleh Hidayati (2013) menghasilkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum.

4.5.7 Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.

Hipotesis ketujuh penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Berdasarkan pengujian pada tabel diatas interaksi variabel Pertumbuhan Ekonomi dengan variabel Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai pada koefisien regresi sebanyak $-1,683E-9$ serta nilai signifikansi sebanyak 0,772 lebih tinggi dari nilai signifikansi 0,05. Memberikan arti jika H_7 yaitu Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal ditolak pada penelitian ini.

Hasil ini tidak mampu mengkonfirmasi teori agensi mengenai hubungan antara masyarakat sebagai *principal* berperan untuk membayarkan kewajibannya

dengan pemerintah daerah sebagai *agent* berperan mempunyai tanggung jawab memberikan atau menyediakan sarana dan prasarana yang baik (*public service*) untuk masyarakat dengan mengelola pendapatan tersebut, karena dalam Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus digunakan tanpa mempertimbangkan naik atau turunnya Pertumbuhan Ekonomi pada suatu daerah. Untuk memenuhi anggaran Belanja Modal pemerintah daerah menggunakan DAK dari pemerintah pusat, sehingga Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memiliki pengaruh terhadap pemenuhan anggaran Belanja Modal.

Sejalan oleh penelitian Simbolon et al.(2020) menyebutkan jika Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Namun bertolak dengan penelitian oleh Mohklas & Purwati (2019) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

4.5.8 Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal.

Hipotesis kedelapan penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Melalui pengujian tabel diatas, interaksi variable Pertumbuhan Ekonomi dengan Dana Bagi Hasil mempunyai nilai pada koefisien regresi yaitu $-5,716E-9$ dan nilai signifikansi sebesar 0,567 lebih tinggi dari nilai signifikansi 0,05. Memiliki arti bahwa H_8 yaitu Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal ditolak.

Hal tersebut tidak mampu mengkonfirmasi teori agensi tentang hubungan antara pemerintah pusat sebagai *principal* berperan memberikan dana perimbangan (Dana Alokasi Umum) kepada pemerintah daerah sebagai *agent*, dalam tanggung jawabnya untuk mengelola dana perimbangan dan dialokasikan kedalam belanja modal.

Hal ini terjadi dikarenakan pemerintah daerah mampu memenuhi belanja modalnya sendiri dengan penerimaan yang didapat melalui sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lainnya. Sehingga naik turunnya Pertumbuhan Ekonomi tidak mempengaruhi dalam hal pemenuhan Belanja Modal suatu daerah.

Penelitian ini selurus dengan penelitian oleh Simbolon et al.(2020) memberikan hasil yaitu pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal. Namun tidak sejalan dengan penelitian oleh Salama (2018) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Melalui pembahasan sebelumnya pada bab – bab diatas pada penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan antara lain :

- 1) Pada penelitian ini memberikan hasil yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2020.
- 2) Pada penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2020.
- 3) Berdasarkan penelitian ini memberikan hasil ialah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2020.
- 4) Pada penelitian ini memberikan hasil yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2020.
- 5) Pada penelitian ini memberikan hasil ialah Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2020.
- 6) Berdasarkan penelitian ini memberikan hasil adalah Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap

Belanja Modal di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2020.

- 7) Pada penelitian ini memberikan hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2020.
- 8) Pada penelitian ini memberikan hasil ialah Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2020.

5.2 Keterbatasan

Pada penelitian ini mempunyai keterbatasan diantaranya yaitu :

- 1) Hasil penelitian sangat bergantung pada data yang ada pada website Badan Pusat Statistika (BPS)
- 2) Dalam pengumpulan data pada penelitian ini memiliki keterbatasan seperti adanya data pada tahun 2021 yang *audited* atau belum di *update*. Untuk meminimalisir data yang *audited* atau di *update* maka peneliti hanya menggunakan rentang waktu 4 tahun (2017 – 2020).

5.3 Implikasi Penelitian

- 1) Implikasi Teoritis
 - a. Pendapatan Asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal suatu daerah. Penerimaan yang meningkat dapat mengakibatkan belanja modal yang naik pula. Begitu pula sebaliknya

- b. Meskipun Dana Alokasi Umum tidak mampu mempengaruhi Belanja modal dalam penelitian ini, diharapkan Pemerintah tetap memberikan dana sesuai dengan penggunaan dan prioritas tiap daerahnya
 - c. Penerimaan Dana Alokasi Khusus menjadi tolak ukur dalam pengaruh Belanja Modal.
 - d. Pemerintah daerah yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri mengakibatkan Dana Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.
 - e. Pada penelitian ini Pertumbuhan Ekonomi tidak berkaitan terhadap PAD,DAU,DAK,DBH dengan Belanja Modal, sehingga pemerintah dapat mencari solusi atau membentuk sebuah strategi untuk dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di suatu daerahnya.
- 2) Implikasi Praktis
- Melalui hasil penelitian ini bisa dijadikan masukan untuk pemerintah pusat maupun daerah agar dapat melakukan evaluasi mengenai alokasi penyaluran dana atau penerimaan dana dengan memperhatikan kebutuhan masing masing daerah agar terhindari ketimpangan dana.

5.4 Agenda Penelitian Yang Akan Datang

Dengan adanya agenda pada penelitian yang dan hasil penelitian yang kurang memuaskan, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan saran dibawah ini, antara lain :

- 1) Pada Penelitian ini variabel independent hanya menggunakan empat yaitu PAD (Pendapatan Asli Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum) , DAK (Dana Aloasi Khusus) , DBH (Dana Bagi Hasil) , Terdapat peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel lain yang berpengaruh terhadap Belanja Modal seperti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain lainnya.
- 2) Menggunakan tahun selanjutnya atau menambah jumlah tahun penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abid, M., Rahayu, S., & Aminah, W. (2018). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL. 5(1), 753–759.
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 190–205.
- Azhar, A. Al, & Hermanto, S. B. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 85–92.
<https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.10985>
- Cahyaning, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(1), 20–38. <https://doi.org/10.20473/jiet.v3i1.7874>
- Fahrunisah, N., & Badjuri, A. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Fahrunisah, N., & Badjuri, A. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Empiris pada Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2015). 6(2), 189–205.
- Fathia & Rusdi. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 379–396. <http://arxiv.org/abs/1011.1669><http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Hardiningsih, A. P., & Wakhidati, I. N. (2017). Karakteristik Daerah Terhadap belanja Modal Dengan pemoderasi pertumbuhan Ekonomi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 6(1), 53–66.

- Heliyanto, F., & Handayani, N. (2016). Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* :, 5(3), 1–17.
- Hidayati, N. (2013). ANALISIS PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH. *Occupational Medicine*, 53(4), 130.
- Hidayati, N. (2016). Naskah Publikasi Naskah Publikasi. 30.
- Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 14(1), 85–100.
<https://doi.org/10.21009/wahana.14.016>
- Jaeni, G., & L, A. (2016). Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK*, 2005, 692–702.
- Jayanti, F. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3), 335–341.
<https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.30045>
- Kumala, D. N. C. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal (Studi Kasus Pada 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 6(2), 1–12.
- Mohklas, & Purwati, D. I. (2019). MEMODERASIKAH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL? (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2016). *Stability: Journal of Management and Business*, 2(1).
<https://doi.org/10.26877/sta.v2i1.4029>
- Mokhlas, & Purwati, D. I. (2019). MEMODERASIKAH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL? (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2016). *Stability: Journal of Management and Business*, 2(1).

<https://doi.org/10.26877/sta.v2i1.4029>

- Nurchayati, N. (2021). Belanja Modal APBD KABUPATEN-KOTA Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017–2018. *Serat Acitya*, 2(1), 44–54.
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/2101>
- Prabawati, pusпита sari surya, & Wany, E. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(November 2016), 1–17.
- Prabawati, P. S. S., & Eva Wany, SE., M. A. (2018). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2015. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 1. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v0i0.414>
- Prasetyo, D., & Isyunawardhana, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (studi Pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019). *eProceedings ...*, 8(6), 8376–8385.
<https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/17046>
- Rahmawati, R., & Tjahjono, A. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di D.I Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 26(2), 195–209.
- Salama, S. C. U. (2018). THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME, GENERAL ALLOCATION FUNDS, AND RESULTS SHARING FUNDS ON CAPITAL EXPENDITURE ALLOCATION WITH ECONOMIC GROWTH AS MODERATING VARIABLES IN EAST JAVA REGENCY/CITY GOVERNMENT 2013-2015. 3(1), 20–38.
<https://doi.org/10.20473/jiet.v3i1.7874>
- Setyarini, N., & Rustiyaningsih, S. (2018). TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Pulau Jawa). *July*, 1–16.
- Sholikhah, I., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 553–562.

- Simbolon, Y. C., Maksum, A., & Abubakar, E. (2020a). Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu periode 2012-2018. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 826–839. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11546>
- Simbolon, Y. C., Maksum, A., & Abubakar, E. (2020b). Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu periode 2012-2018. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 826–839. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11546>
- STEVANUS J. GOMIES, & VICTOR PATTIASINA. (2011). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Aset*, 13(2), 175–184.
- Styaningrum, R. (2020). ... Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/88098>http://eprints.ums.ac.id/88098/1/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
- Sulistyaningsih, I., & Haryanto. (2019). Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–12.
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 183–191.
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(33), 44–51.
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan (JRAK)*, 7(1), 11–21.